



**ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PDRB
TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN
2010-2016**

SKRIPSI

Oleh:

**BERLINTA OVA VEZIA LORITA
NIM 140810101073**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PDRB
TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN
2010-2016**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Berlinta Ova Vezia Lorita
NIM 140810101073**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Pusrini dan Ayahanda Sukar tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Guru-guru sekolahku Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Terjemah QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia.”

(Nelson Mandela)

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

(Albert Einstein)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlinta Ova Vezia Lorita

NIM : 140810101073

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan PDRB Terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Mei 2018

Yang menyatakan,

Berlinta Ova Vezia Lorita

NIM 140810101073

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PDRB
TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN
2010-2016**

Oleh

Berlinta Ova Vezia Lorita
NIM 140810101073

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan PDRB
Terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun
2010-2016

Nama Mahasiswa : Berlinta Ova Vezia Lorita

NIM : 1140810101073

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 14 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P.

NIP. 195504251985031001

Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si.

NIP. 196907181995122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.

NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PDRB
TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN
2010-2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Berlinta Ova Vezia Lorita

NIM : 140810101073

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 Juli 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

- | | | |
|---------------|---|---------|
| 1. Ketua | <u>Prof.Dr.Mohammad Saleh, M.Sc.</u>
NIP. 195608311984031002 | (.....) |
| 2. Sekertaris | <u>Fajar Wahyu P., S.E, M.E.</u>
NIP. 198103302005011003 | (.....) |
| 3. Anggota | <u>Dr.Regina Niken W., S.E, M.Si.</u>
NIP. 19740913200112001 | (.....) |

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP. 19710727199512101

Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan PDRB Terhadap Upah Minimum
Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016

Berlinta Ova Vezia Lorita

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan PDRB terhadap Upah Minimum Provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakan berupa time series (tahun 2010-2016) dan cross section (6 Provinsi di Pulau Jawa). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier data panel dengan metode Fixed Effect digunakan alat bantu software Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016, akan tetapi PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015.

Kata kunci : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB, Upah Minimum.

An Analysis of the Labor Force Participation Rate and GRDP on Provincial Minimum Wage in Java Island Period 2010-2016

Berlinta Ova Vezia Lorita

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

This study aims to determine Analysis of the Labor Force Participation Rate and GRDP on Provincial Minimum Wage. This research is a quantitative research using panel data, data used in the form of time series (2010-2016) and cross section (6 province in Java Island). Data used in this research is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the journal as a supporter. The analytical method used is the method of linear regression analysis of panel data with Fixed Effect method used Eviews software tool 9. The results showed that, Labor Force Participation Rate variables has no significant effect on the Provincial Minimum Wage in Java Island in 2010-2016, but the GRDP have a significant influence on the Provincial Minimum Wage in Java Island in 2010-2016.

Key words: Labor Force Participation Rate, GRDP, Provincial Minimum Wage.

RINGKASAN

Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan PDRB Terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa; Berlinta Ova Vezia Lorita; 140810101073; 2018; 109 Halaman; Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kehidupan yang layak disetiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam proses produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut, tenaga kerja memperoleh imbalan jasa dari perusahaan berupa upah. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi kehidupan tenaga kerja. Karyawan atau pekerja sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya.

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkat laba yang dihasilkan, sehingga pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum. Oleh karena itu, laba perusahaan dapat ditingkatkan. Di pihak lain, karyawan atau pekerja menganggap upah sebagai balas jasa terhadap apa yang telah ia kerjakan, sehingga pekerja akan menuntut upah lebih untuk mencukupi kebutuhannya agar mereka dapat hidup sejahtera, tetapi dalam kenyataannya, hanya beberapa pengusaha yang secara sukarela untuk meningkatkan taraf hidup karyawan, terutama pekerja golongan paling bawah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel TPAK memiliki t-hitung sebesar -1,116982 dan probabilitas sebesar 0,2718. Dalam taraf signifikan 5% maka variabel TPAK secara individu tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai UMP di Pulau Jawa. Nilai koefisien regresi sebesar -0,020187

menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif terhadap nilai UMP di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan TPAK 1% maka akan menyebabkan penurunan nilai UMP sebesar 0,02%. Variabel PDRB memiliki t-hitung sebesar 9,850729 dan probabilitas sebesar 0,00000. Dalam taraf signifikan 5% maka variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap UMP. Nilai koefisien regresi sebesar 2,049438 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap nilai UMP di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan PDRB 1% maka akan menyebabkan kenaikan nilai UMP sebesar 2,05%.

Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak memiliki pengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016. sedangkan Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur periode 2010-2015” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Lilis Yuliati, S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing II serta Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Sebastiana Viphindaratin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
5. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Ibunda Pusri dan Ayahanda Sukar yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa;

7. Rekan-rekan terbaik penulis di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2014 Devi Oktavia Herdiana Anggiasari, Hermin Purnamasari, Nur Ari Santi, Karlina Kusumasari, Rani Ardella terimakasih atas motivasinya;
8. Teman-teman KKN 54 Desa Jambe Wungu Kec. Wringin Kab. Bondowoso, Lovina, Reni, Pravita, Gek, Amek, Fardhan, Baidawi, Iqbal, Ryan;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 14 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Upah.....	87
2.1.2 Upah Minimum	11
2.1.3 Pengaruh TPAK terhadap Upah Minimum Provinsi	19
2.1.4 Pengaruh PDRB terhadap Upah Minimum Provinsi	19
2.2 Penelitian Yang Relevan	21
2.3 Kerangka Konseptual	24

2.4 Hipotesis Penelitian	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.3 Jenis Dan Sumber Data	27
3.4 Metode Analisis Data	28
3.4.1 Analisis Regresi Data Panel	28
3.4.2 Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel	29
A. Uji Asumsi Klasik	30
B. Uji Statistik	32
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian	33
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Pulau Jawa	34
4.1.1 Kondisi dan Letak Geografis Pulau Jawa	34
4.1.1 Kondisi Kependudukan Pulau Jawa	36
4.2 Gambaran Umum Perekonomian Pulau Jawa	37
4.2.1 Kondisi PDRB di Pulau Jawa	37
4.2.2 Kondisi UMP di Pulau Jawa	39
4.3 Hasil Analisis Data	40
4.3.1 Deskripsi Data Penelitian	40
4.3.2 Pemilihan Model Estimasi Data Panel	43
4.3.3 Analisis Regresi Data Panel	45
4.3.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	46
4.3.5 Hasil Uji Statistik	49
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	51
4.4.1 Pengaruh Tingkat Perisipasi Angkatan Kerja Terhadap UMP	51
4.4.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap UMP	51
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

LAMPIRAN..... 58

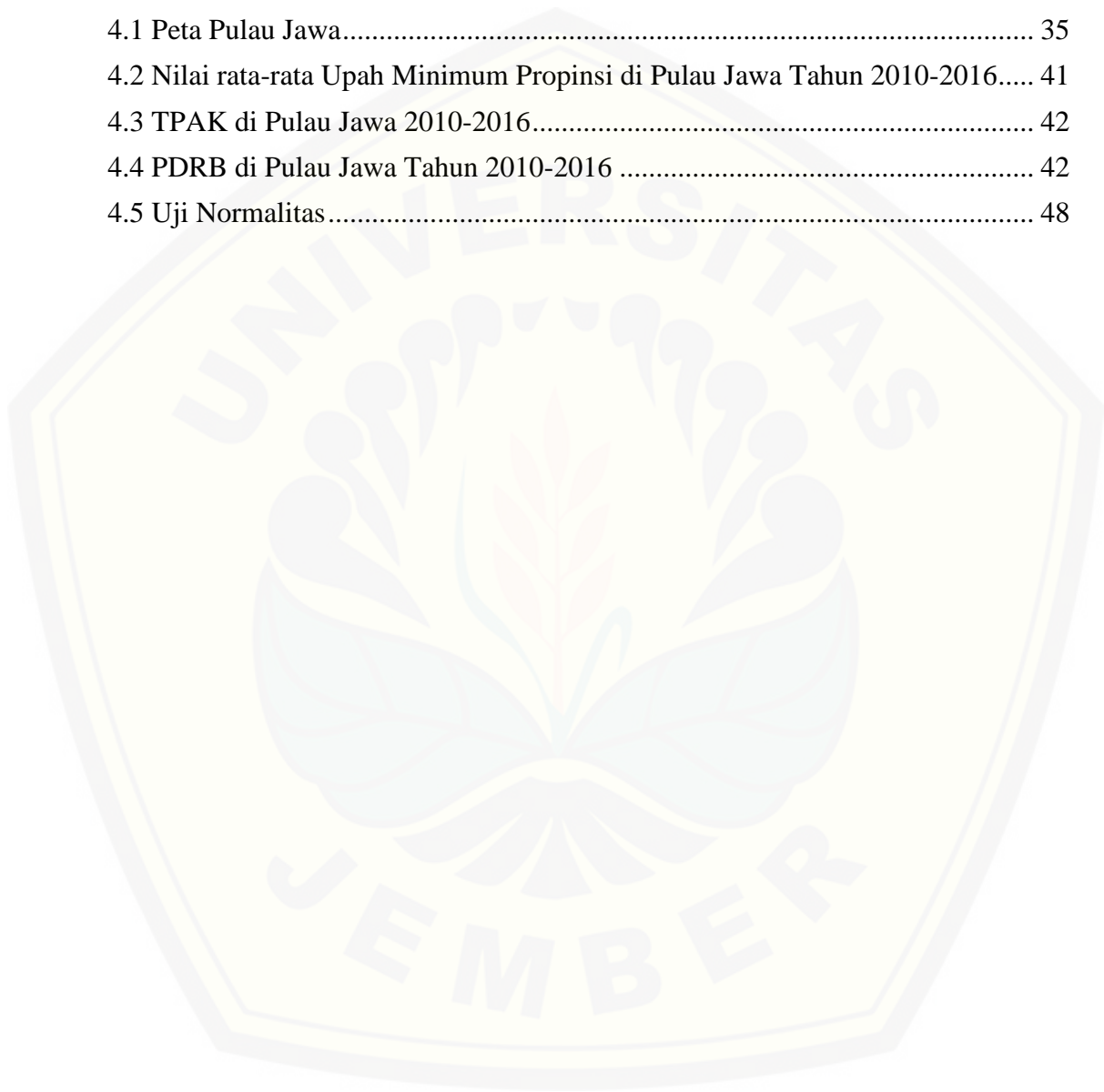


DAFTAR TABEL

1.1 UMP di Pulau Jawa Tahun 2010-2016	2
1.2 TPAK di Pulau Jawa Tahun 2010-2016	3
1.3 PDRB di Pulau Jawa Tahun 2010-2016	4
2.1 Penelitian Yang Relevan	21
3.1 Sumber Data Penelitian	28
3.2 Kriteria Pengujian Durbin Waston	31
4.1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi Masing-masing Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010	36
4.2 TPAK Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016 (Persen)	36
4.3 Kondisi Perekonomian Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun Dasar 2010 (Persen)	37
4.4 PDRB Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)	38
4.5 UMP di Pulau Jawa Tahun 2010-2016 (Rupiah)	39
4.6 Hasil Analisis Deskriptif	40
4.7 Hasil Uji Chow	43
4.8. Hasil Uji Haussman	44
4.9 Hasil Uji Breush Pagan LM Test	45
4.10 Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Menggunakan Metode Fixed Effect	46
4.11 Hasil Uji Multikolinieritas	46
4.12 Uji Glejser	47
4.13 Hasil Pengujian Durbin Watson	47
4.14 Hasil Uji F-Statistic	49
4.15 Hasil Uji t	49
4.16 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	51
4.17 Pernyataan Pengaruh TPAK Terhadap UMP	53
4.18 Pernyataan Pengaruh PDRB Terhadap UMP	54

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir Penelitian	25
4.1 Peta Pulau Jawa.....	35
4.2 Nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016.....	41
4.3 TPAK di Pulau Jawa 2010-2016.....	42
4.4 PDRB di Pulau Jawa Tahun 2010-2016	42
4.5 Uji Normalitas.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

A	Data Penelitian.....	58
B	Hasil Uji Analisi Deskriptif.....	59
C	Hasil Uji Pooled Least Square/Common Effect Model.....	59
D	Hasil Uji Fixed Effect Model.....	60
E	Hasil Uji Random Effect Model.....	61
F	Hasil Uji Chow.....	62
G	Hasil Uji Hausman.....	63
H	Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	64
I	Hasil Uji Multikolinieritas.....	64
J	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	64
K	Hasil Uji Autokorelasi.....	65
L	Hasil Uji Normalitas.....	66
M	Data Upah Minimum Provinsi BPS Tahun 1997-2016.....	67
N	Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja BPS Tahun 2010-2011.....	70
O	Data PDRB Menurut Harga Konstan BPS Tahun 2010-2016.....	86
P	Data PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Tahun 2011-2015.....	88

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kehidupan yang layak disetiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam proses produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut, tenaga kerja memperoleh imbalan jasa dari perusahaan berupa upah. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi kehidupan tenaga kerja. Karyawan atau pekerja sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya.

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkat laba yang dihasilkan, sehingga pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum. Oleh karena itu, laba perusahaan dapat ditingkatkan. Di pihak lain, karyawan atau pekerja menganggap upah sebagai balas jasa terhadap apa yang telah ia kerjakan, sehingga pekerja akan menuntut upah lebih untuk mencukupi kebutuhannya agar mereka dapat hidup sejahtera, tetapi dalam kenyataannya, hanya beberapa pengusaha yang secara sukarela untuk meningkatkan taraf hidup karyawan, terutama pekerja golongan paling bawah.

Upaya untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja, pemerintah harus membuat peraturan untuk mengatur masalah pengupahan yang biasa dikenal dengan upah minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang

berpenghasilan tertinggi dan terendah. Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum.

Di Indonesia, masing-masing provinsi menetapkan upah minimum yang berbeda-beda. Namun, masih ada beberapa Provinsi di Pulau Jawa yang menetapkan UMP dibawah rata-rata UMP Nasional, kecuali Provinsi DKI Jakarta yang masih menetapkan upah diatas rata-rata UMP. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. UMP di Pulau Jawa Tahun 2010-2016 (Rupiah)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DKI Jakarta	1.118.009	1.290.000	1.529.150	2.200.000	2.441.000	2.700.000	3.100.000
Jawa Barat	671.500	732.000	780.000	850.000	1.000.000	1.000.000	2.250.000
Jawa Tengah	660.000	675.000	765.000	830.000	910.000	910.000	1.265.000
Yogyakarta	745.694	808.000	892.660	947.114	988.500	988.500	1.235.700
Jawa Timur	630.000	705.000	745.000	866.250	1.000.000	1.000.000	1.283.000
Banten	955.300	1.000.000	1.042.000	1.170.000	1.325.000	1.600.000	1.784.000
Rata-rata UMP Nasional	796.750,5	868.333,33	958.968,33	1.143.894	1.277.416,7	1.366.416,7	1.819.617

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2010-2016

Penetapan upah minimum didasarkan pada standar biaya hidup. Namun, rata-rata tingkat UMP di Pulau Jawa masih dibawah nilai kebutuhan hidup layak pekerja. Pemerintah menetapkan UMP yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan menggunakan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, pada kenyataannya fakta di lapangan secara rata-rata UMP baru memenuhi sekitar 90% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Komponen KHL yang

ditetapkan pemerintah masih belum bisa mewakili kebutuhan para pekerja. Pemerintah menetapkan KHL dengan beberapa komponen. Dalam prakteknya, KHL ini masih banyak terjadi ketidakadilan bagi pekerja. Oleh karena itu, KHL dirasa kurang jika digunakan sebagai dasar penetapan nilai UMP, sehingga perlu menggunakan faktor lain yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga digunakan dalam penetapan nilai UMP. TPAK juga dapat digunakan untuk mengetahui penawaran tenaga kerja, sehingga dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja tersebut, maka dapat disesuaikan upah yang layak bagi pekerja, karena biasanya upah dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa sendiri selama periode 2010-2012 mengalami kenaikan, sedangkan untuk TPAK mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada tahun 2013-2015. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini disebabkan oleh peningkatan penduduk berumur 15 tahun ke atas pada periode yang sama. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. TPAK di Pulau Jawa Tahun 2010-2016 (Persen)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DKI Jakarta	67,83	69,30	71,47	67,79	66,61	66,39	66,91
Jawa Barat	62,38	61,34	63,64	62,82	62,77	60,34	60,65
Jawa Tengah	70,60	70,15	71,26	70,43	69,68	67,86	67,15
Yogyakarta	69,76	70,15	71,37	69,29	71,05	68,38	71,96
Jawa Timur	69,08	68,06	69,60	69,78	68,12	67,84	66,14
Banten	65,34	65,61	65,17	63,55	63,84	62,24	63,66
Rata-rata TPAK	67,50	67,43	68,75	67,28	67,01	65,51	66,08

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2010-2016

Penurunan TPAK ini disebabkan karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, sehingga tingkat penawaran tenaga kerja Provinsi di Pulau Jawa menurun. Apabila penawaran tenaga kerja meningkat, kelebihan penawaran tenaga kerja akan diserap sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa tenaga kerja di sektor informal lebih rendah, maka nilai upah akan memburuk.

Penetapan besarnya UMP yang baru juga mempengaruhi pada nilai tambah yang dihasilkan oleh pekerja. Teori upah efisiensi mengatakan, dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk memberi nutrisi yang baik untuk anaknya, sehingga akan memberi dampak yang besar dalam peningkatan produktivitasnya. Upah yang diberikan menurut teori ini jauh di atas upah keseimbangan, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat, dan jumlah output yang diproduksi juga akan meningkat. Jumlah tingkat output yang diproduksi disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB penting jika digunakan dalam penetapan nilai upah minimum karena tingkat output yang diproduksi akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Jadi apabila laba meningkat, maka tingkat upah minimum selanjutnya juga meningkat. Perkembangan nilai laju PDRB di Pulau Jawa dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. PDRB di Pulau Jawa Tahun 2010-2016 (Milyar Rupiah)

Tahun	Ket	Provinsi					
		DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2010	PDRB	1.075.183,48	906.685,76	623.224,62	64.678,97	990.648,84	271.465,28
2011	PDRB	1.147.558,23	965.622,06	656.268,13	68.049,87	1.054.401,77	290.545,84
2012	PDRB	1.222.527,92	1.028.409,74	691.343,12	71.702,45	1.124.464,64	310.385,59
2013	PDRB	1.296.694,57	1.093.543,55	726.655,12	75.627,45	1.192.789,80	331.099,11
2014	PDRB	1.373.389,13	1.149.216,06	764.959,15	79.536,08	1.262.684,50	349.351,23
2015	PDRB	1.454.345,82	1.207.083,41	806.775,36	83.474,44	1.331.394,99	368.216,55
2016	PDRB	1.539.376,65	1.275.546,48	849.383,56	87.687,93	1.405.236,11	387.595,37

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2010-2016

PDRB di setiap Propinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB ini diiringi dengan peningkatan UMP, walaupun

masih ada laju UMP di Pulau Jawa pada tahun tertentu masih di bawah nilai laju PDRB. Perubahan tingkat kesejahteraan dari waktu ke waktu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi nilai UMP. Tingkat kesejahteraan suatu daerah tidak hanya dilihat dari besar kecilnya PDRB, karena PDRB tidak bisa menunjukkan berapa jumlah penduduk yang harus dihidupi dari PDRB. PDRB suatu daerah tinggi belum tentu daerah tersebut sejahtera karena jumlah penduduk di daerah tersebut juga tinggi, sehingga ukuran yang lebih tepat untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah dengan menggunakan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah hasil perbandingan antara PDRB dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama, Pendapatan per kapita juga menstabilkan PDRB per kapita.

Nilai pendapatan per kapita di Pulau Jawa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita juga akan mempengaruhi nilai UMP karena pendapatan per kapita merupakan tolak ukur kesejahteraan dan tingkat pembangunan sebuah negara. Ketika pendapatan per kapita naik, maka nilai UMP juga akan naik karena masyarakat akan mampu membeli barang dan jasa yang disediakan oleh produsen, sehingga laba para pengusaha akan naik, dan pengusaha mampu membayar pekerja dengan upah yang lebih tinggi. Jadi tingkat kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh terhadap nilai upah minimum. Rata-rata pendapatan per kapita di Pulau Jawa memiliki nilai di bawah nilai pendapatan per kapita nasional, kecuali Provinsi DKI Jakarta. Hal ini yang menyebabkan nilai UMP di Pulau Jawa menjadi rendah. Penghitungan upah minimum di suatu provinsi ditentukan berdasarkan oleh beberapa faktor. Namun, penelitian ini hanya dibatasi pada TPAK dan PDRB karena penelitian ini hanya menggunakan faktor makro di Pulau Jawa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh TPAK terhadap UMP di Pulau Jawa?
2. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap UMP di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh TPAK terhadap UMP di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh PDRB terhadap UMP di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi UMP serta membuka kemungkinan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pengupahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu analisis tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB terhadap mempengaruhi UMP di Pulau Jawa
- b. Menjadi masukan dan bahan pembuatan kebijakan dalam perencanaan peningkatan kesejahteraan pekerja.
- c. Menjadi sumber informasi bagi pekerja mengenai nilai UMP yang diterimanya dibandingkan dengan nilai UMP daerah lain.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi masyarakat tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Provinsi, dan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Upah

A. Pengertian Upah

Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Menurut Sadono Sukirno (2002:353) upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan disebabkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi (Sumarsono, 2003:106).
2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin - mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect*) (Sudarsono, 1988:35).

Definisi upah pada UU No 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa upah adalah pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental sebagai imbalan dari para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu yang di dalamnya berupa perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak termasuk tunjangan bagi pekerja, dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

B. Teori Upah Efisiensi

Menurut teori upah efisiensi, perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika upah berada di atas ekuilibrium, jadi akan lebih menguntungkan jika perusahaan tetap mempertahankan upah tetap tinggi meskipun penawaran tenaga kerja berlebih. Menurut teori upah efisiensi membayar upah yang tinggi mungkin akan menguntungkan perusahaan karena bisa menaikkan efisiensi para pekerja.

Teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Cafferty (1990) menyatakan bahwa apabila pekerja dengan mendapatkan upah yang tinggi maka dia dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum hidupnya, sehingga dengan demikian apabila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi maka pekerja akan berangkat ketempat pekerjaannya dengan tenang, dan bagi pekerja sendiri dia akan memberikan konsentrasi yang penuh dan akan mencurahkan pemikiran dan tenaganya secara maksimal selama dia berada di tempat pekerjaannya. Dampak secara ekonomi yang dimunculkan bagi perusahaan adalah tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan upah yang tinggi maka pekerja akan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dengan hasil yang lebih memuaskan sehingga dengan

demikian pekerja akan merasa lebih puas dengan hasil pekerjaannya, sedangkan bagi perusahaan merasa tidak mengalami kerugian dengan mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dan selalu giat dalam meningkatkan hasil produktivitas kerjanya.

Ada beberapa jenis teori upah efisiensi untuk menjelaskan mengapa perusahaan mau membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja menurut (Mankiw, 2013:126) :

1. Kesehatan Pekerja

Teori upah efisiensi yang berkaitan dengan kesehatan pekerja. Para pekerja yang memperoleh upah yang lebih tinggi dapat mengkonsumsi lebih banyak nutrisi, dan dengan demikian akan lebih sehat dan lebih produktif. Sebuah perusahaan mungkin lebih menguntungkan untuk membayar upah tinggi dan memiliki tenaga kerja yang sehat dan produktif, daripada membayar upah yang rendah tetapi memiliki pekerjaan yang tidak sehat dan kurang produktif. Jenis teori upah efisiensi ini tidak relevan untuk negara maju karena bagi Negara yang sudah maju dan kaya keseimbangan upah sebagian besar di atas tingkat untuk mengkonsumsi nutrisi yang berkecukupan, di sini perusahaan tidak perlu ada kekhawatiran jika mereka membayar upah ekuilibrium kesehatan para pekerja mereka akan menurun. Jenis teori upah ini lebih relevan untuk negara berkembang karena sebagian besar pekerja di negara berkembang kekurangan nutrisi merupakan masalah yang umum, dinegara-negara yang belum maju perusahaan mungkin merasa takut bahwa jika upah dipotong, kesehatan dan produktivitas kerja akan menurun

2. Perputaran Pekerja

Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan hubungan antara upah dengan perputaran kerja. Pekerja berhenti bekerja karena beberapa alasan pindah tempat pekerjaan lain, pindah ke kota lain, meninggalkan angkatan kerja dal lain-lain. Frekuensi perputaran ini tergantung pada insentif-insentif yang mereka hadapi yaitu manfaat terus bekerja *versus* manfaat berhenti kerja. Semakin tinggi upah yang dibayar kepada tenaga kerja semakin rendah kemungkinan pekerja

akan berhenti dari pekerjaannya, jadi sebuah perusahaan dapat mengurangi perputaran pekerja dengan membayar upah yang lebih tinggi.

Alasannya kekhawatiran perputaran pekerja tersebut adalah akan lebih mahal bagi perusahaan untuk merekrut dan melatih pekerja-pekerja baru. Selain itu mereka telah dilatih para pekerja baru tidak seproduktif pekerja yang berpengalaman, perusahaan memiliki perputaran pekerjaan yang tinggi dengan demikian akan memiliki biaya produksi yang tinggi pula. Bagi perusahaan mungkin akan lebih menguntungkan apabila membayar upah pekerja di atas tingkat ekuilibrium dalam rangka mengurangi perputaran pekerja.

3. Kerja Keras Pekerja.

Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan bagaimana keterkaitan antara upah dengan kerja keras pekerja. Dalam banyak pekerjaan, pekerja bekerja secara bebas, akibatnya perusahaan harus memantau kinerja pekerja tersebut, dan bagi para pekerja yang terbukti melalaikan tanggung jawab mereka akan dipecat. Tetapi tidak semua yang lalai bisa tertangkap secara langsung karena pemantauan pekerja mahal dan dan tidak efisien. Sebuah perusahaan dapat menanggulangi masalah ini dengan membayar upah di atas tingkat ekuilibrium. Upah yang lebih tinggi akan membuat pekerja lebih setia, dan dengan demikian memberikan insentif kepada pekerja untuk mencurahkan upaya dan pikiran mereka semaksimal mungkin.

4. Kualitas Pekerja.

Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan bagaimana hubungan antara upah dengan kualitas pekerja. Saat merekrut tenaga kerja baru, sebuah perusahaan tidak bisa secara tepat mengukur kualitas dari para pekerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan dapat menarik kelompok pelamar yang lebih berkualitas. Dalam teori upah efisiensi ini ketika sebuah perusahaan menghadapi *suplpy* pekerja yang berlebihan, mungkin tampak masuk akal dan menguntungkan untuk menurunkan upah yang ditawarkan. Tetapi dengan menurunkan upah, perusahaan beresiko kehilangan pekerja yang berkualitas.

2.1.2 Upah Minimum

A. Pengertian Upah Minimum

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut UMP. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Definisi tersebut terdapat dua unsur penting dari upah minimum yaitu:

1. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.
2. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaini, 1998).

B. Serikat Pekerja dan Tawar Menawar Kolektif

Serikat pekerja (*union*) adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar menawar dengan pemberi kerja mengenai upah, dan kondisi kerja. Serikat pekerja merupakan sejenis kartel, yaitu sekelompok penjual yang bekerja sama dengan harapan menggunakan daya pasar bersama mereka (Mankiw, 2013:123). Banyak pekerja dalam perekonomian membahas upah, tunjangan, dan kondisi kerja mereka dengan perusahaan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Proses disepakatinya syarat-syarat kerja antara serikat pekerja, dan perusahaan disebut dengan tawar-menawar kolektif (*collective bargaining*).

Ketika berunding dengan perusahaan. Serikat pekerja meminta upah lebih tinggi, tunjangan lebih besar, dan kondisi kerja yang lebih baik daripada ditawarkan oleh perusahaan tanpa adanya serikat pekerja. Jika serikat pekerja, dan perusahaan tidak mencapai kesepakatan, serikat pekerja dapat melakukan penarikan pekerja dari perusahaan, yang disebut dengan pemogokan (*strike*). Pekerja yang mengalami pemogokan tersebut akan mengurangi produksi, penjualan, dan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang menghadapi ancaman pemogokan, besar kemungkinan menyetujui untuk membayar upah yang lebih tinggi.

Apabila serikat pekerja meningkatkan upah di atas titik keseimbangan, serikat pekerja akan meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja, dan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja, sehingga akan menimbulkan pengangguran. Para pekerja yang tetap bekerja menerima keuntungan, namun mereka yang sebelumnya bekerja, dan menganggur, ketika upah meningkat justru akan dirugikan.

Para pendukung serikat pekerja berpendapat bahwa serikat pekerja diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan perusahaan-perusahaan di pasar tenaga kerja. Contoh kasus ekstrim dari kekuasaan pasar tenaga kerja adalah “*company town*” yaitu satu perusahaan mempekerjakan hampir seluruh angkatan kerja yang ada di satu wilayah geografis. Tanpa adanya serikat pekerja, perusahaan dapat menggunakan kekuatan pasarnya untuk membayar upah lebih rendah, dan menawarkan kondisi kerja lebih buruk. Dalam kasus ini, serikat pekerja dapat

menyeimbangkan keseimbangan pasar perusahaan, dan melindungi para pekerja dari kesewenangan pemilik perusahaan.

Para pendukung serikat pekerja juga menyatakan bahwa serikat pekerja penting untuk membantu perusahaan merespon kepentingan pekerja secara efisien. Kapan pun seorang pekerja menerima pekerjaan, pekerja tersebut, dan perusahaan harus sepakat dengan berbagai atribut pekerjaan tersebut selain upah meliputi jam kerja, lembur, cuti tahunan, cuti sakit, tunjangan kesehatan, jadwal promosi, jaminan kerja, dan sebagainya. Dengan mewakili pandangan pekerja terhadap isu-isu ini, harus ada kebijakan untuk menyeimbangkan perbedaan pandangan antara pekerja dengan para pengusaha, sehingga perlu adanya penentuan upah yang sesuai, dan tidak memberatkan pengusaha maupun pekerja. Dalam hal ini, dibuat peraturan tentang upah minimum bagi pekerja. Dengan adanya upah minimum, maka kesejahteraan para pekerja dapat terjamin.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013, faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum diarahkan pada pencapaian KHL yaitu dengan membandingkan besarnya upah minimum disesuaikan dengan nilai KHL pada periode yang sama. Komponen Kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan Upah Minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100kcal perhari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya. Awalnya penghitungan upah minimum dihitung didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), Kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Perubahan itu disebabkan tidak sesuai lagi penetapan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, sehingga timbul perubahan yang disebut dengan KHM. Namun, penetapan upah minimum berdasarkan KHM mendapat koreksi cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi implikasi pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat level bawah. Melalui beberapa pendekatan dan penjelasan

langsung terhadap pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan KHM dapat berjalan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.

Perkembangan teknologi dan sosial ekonomi yang cukup pesat menimbulkan pemikiran, kebutuhan hidup pekerja berdasarkan kondisi "*minimum*" perlu diubah menjadi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak dapat meningkatkan produktivitas kerja, dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dari gambaran itu, timbul permasalahan, sampai saat ini belum ada kriteria atau parameter yang digunakan sebagai penetapan kebutuhan hidup layak itu. Sumber data yang diperoleh dari responden di lapangan menunjukkan, dari komponen dan jenis kebutuhan hidup minimum yang diajukan kepada responden terdapat lima jenis komponen, yaitu makanan dan minuman, perumahan dan fasilitas, sandang, kesehatan, estetika, dan aneka kebutuhan. Komponen KHM sebagai awal tujuan kebutuhan hidup layak, ternyata sebagian besar responden menyetujui jenis dan komponen yang terdapat dalam KHM. Hanya saja, perlu mendapat perubahan meliputi kualitas dari barang yang diajukan, dan kuantitas jumlah barang yang dibutuhkan perlu ditambah. Begitu juga pekerja, harus dapat menyisihkan hasil yang diterima paling tidak sebesar 20 persen sebagai tabungan. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan upah minimum menurut Bersales (2014) diantaranya:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja (*labor force*) didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur, sedangkan tingkat pengangguran (*unemployment rate*) didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja (Mankiw, 2013:111). Menurut Badan Pusat Statistik (2014) TPAK (*labor-force participation rate*) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) Rumus Perhitungan:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$$

Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja akan mula-mula menciptakan penawaran tenaga kerja berlebih, akibatnya upah akan turun. Pasar tenaga kerja dapat digolongkan menjadi pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga kerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (1998), kedua bentuk pasar tenaga kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tenaga terdidik pada umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Kedua, dari segi waktu, penawaran tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas penawaran tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil daripada elastisitas penawaran tenaga kerja tidak terdidik. Ketiga, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik. Penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Seperti halnya penawaran, *demand* atau permintaan tenaga kerja juga merupakan suatu hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja. Motif perusahaan mempekerjakan seseorang adalah untuk membantu memproduksi barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumennya. Besaran permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung pada besaran permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi perusahaan itu. Penentuan permintaan tenaga kerja dapat diturunkan dari fungsi produksi yang merupakan fungsi dari tenaga kerja (L) dan modal (K), sebagai berikut:

$$\text{TP} = f(\text{L}, \text{K})$$

Dimana:

TP : Produksi total (output)

L : Tenaga kerja

K : Modal

Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika upah

diserahkan pada mekanisme pasar yaitu dilihat dari permintaan dan penawaran tenaga kerja, maka pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan jauh di atas permintaannya, hal ini mengakibatkan tingkat upah menjadi lebih rendah.

2. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada periode tertentu (Mankiw, 2013:6). Sisi produksi ekonomi merubah input seperti tenaga kerja, dan modal menjadi output. Input semacam buruh, dan modal disebut faktor produksi, sedangkan pembayaran terhadap faktor tersebut seperti upah dan bunga disebut pembayaran faktor (*factor of payment*). Data PDRB dalam prakteknya digunakan tidak hanya untuk mengukur seberapa banyak output yang diproduksi, tetapi juga sebagai pengukuran kesejahteraan penduduk suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak, dan redistribusi meningkat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut.

Peningkatan output PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk mengukur kinerja keseluruhan. Jumlahnya akan sama dengan jumlah dari nilai nominal konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa serta ekspor netto. Tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB adalah:

a. Pendekatan produksi

Melalui pendekatan produksi, produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan berbagai sector perekonomian. Persamaan fungsi produksi pada pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

$$Y = f(K, L, t) \dots \dots \dots (2.1)$$

Di mana:

Y : Produksi

K : Modal

L : Tenaga Kerja

t : Teknologi

Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor yaitu:

- 1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan,
- 2) pertambangan dan penggalian,
- 3) industri penggalian,
- 4) listrik, gas dan air bersih,
- 5) bangunan,
- 6) perdagangan, hotel dan restoran,
- 7) pengangkutan dan komunikasi,
- 8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,
- 9) jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

b. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh melalui penjumlahan pendapatan dari berbagai faktor produksi terhadap proses produksi. Pendapatan nasional yang dimaksud di sini diperoleh melalui penjumlahan dari berbagai unsur dan jenis pendapatan :

- 1) Kompensasi untuk pekerja yang terdiri dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor lain (pensiun dan dana jaminan sosial).
- 2) Keuntungan perusahaan atau *corporate profit* merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan, yang dibagikan kepada para pemilik saham (*stockholders*) sebagai deviden dan ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.
- 3) Pendapatan usaha perorangan merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employed person*, *self employed professional*, dan lain-lain.
- 4) Pendapatan sewa merupakan kompensasi yang untuk pemilik tanah, *rental business*, dan *residential properties*.
- 5) Bunga netto atau *net interest* terdiri dari bunga yang dibayarkan perusahaan dikurangi bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar pemerintah, dan konsumen tidak termasuk didalamnya.

Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{NI = Yw + Yi + Ynr + Ynd.....(2.2)}$$

Di mana:

NI : Pendapatan nasional

Yw: Pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum pajak

Yi : Pendapatan dari bunga.

Ynr : Pendapatan dari keuntungan perusahaan Y

Ynd: pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

c. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran merupakan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan perekonomian dan diukur pada harga pasar yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa produk nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan di sektor rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan di sektor bisnis seperti barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan sektor ekspor dan impor (X-M).

Perhitungan yang digunakan untuk menghitung output pada perekonomian dengan pendekatan pengeluaran dapat dijelaskan dalam persamaan berikut:

$$\mathbf{Y \text{ atau PDRB} = C + I + G + NX.....(2.3)}$$

Di mana:

Y atau PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

C : konsumsi

I : investasi

G : pengeluaran pemerintah

NX : ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

PDRB adalah semua komponen dari permintaan akhir, yang terdiri dari:

- 1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba
- 2) konsumsi pemerintah,
- 3) pembentukan modal tetap domestik bruto,
- 4) perubahan stok,
- 5) ekspor netto

2.1.3 Pengaruh TPAK Terhadap Upah Minimum Provinsi

Dalam pandangan klasik (Bersales, 2014) upah akan selalu menyesuaikan diri untuk menormalkan kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja akan mula-mula menciptakan penawaran tenaga kerja berlebih, akibatnya upah akan turun. Pasar tenaga kerja dapat digolongkan menjadi pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga kerja tidak terdidik.

Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika upah diserahkan pada mekanisme pasar yaitu dilihat dari permintaan dan penawaran tenaga kerja, maka pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan jauh di atas permintaannya, hal ini mengakibatkan tingkat upah menjadi lebih rendah. Dimana tingkat upah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Untuk melindungi hal tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upah minimum, agar upah yang diterima minimal sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kondisi demikian banyak terjadi pada pasar tenaga kerja yang *unskill labour*, misal Indonesia. Sehingga untuk melindungi para pekerja tersebut maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menerapkan upah minimum guna melindungi para pekerja (buruh).

2.1.4 Pengaruh PDRB Terhadap Upah Minimum Provinsi

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu. Output dari masing-masing barang dan jasa dinilai berdasarkan harga pasarnya dan nilai-nilai itu dijumlahkan sebagai nilai PDB (Dombusch dan Fischer, 1997).

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut. Penelitian data PDB yang digunakan berdasarkan wilayah regional provinsi yang biasanya disebut PDRB. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB atas harga konstan 2010 pada semua sektor karena penelitian ini menganalisis mengenai UMP. Dalam penetapan UMP pihak Pemerintah dan Dewan Pengupahan akan tetap mempertimbangkan faktor lain yaitu PDRB dalam proses penetapan UMP (Bersales, 2014). Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan output PDRB maka upah minimum selanjutnya ditingkatkan (Gaol, 2006).

Peningkatan PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Sehingga presentase pertumbuhan output itu haruslah lebih tinggi dari presentase pertumbuhan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut.

2.2 Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1. Penelitian yang Relevan

No	Nama dan Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Ilham Kristanto, Tahun 2011 dalam sebuah penelitiannya dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi UMK di Kabupaten Jember”	-Variabel Dependen: UMK -Variabel Independen: PDRB, KHL, Inflasi	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara simultan variable KHL, PDRB, dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah minimum. Namun jika secara parsial, variabel yang berpengaruh secara signifikan, dan positif hanya variabel KHL, dan PDRB, sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penetapan nilai upah minimum.
2	Rini sulistiawati, Tahun 2012 dalam sebuah penelitiannya dengan judul “Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”	-Variabel Dependen : Upah Minimum -Variabel Independen : Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat	Analisis data yang digunakan dengan metode data panel yaitu penggabungan antara <i>cross sectional</i> , dan <i>time series</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa data tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap kenaikan upah minimum.
3	Izatun purnami, tahun 2015 dalam sebuah penelitiannya dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013”	-Variabel Dependen : Tenaga Kerja -Variabel Independen : Tingkat Pendidikan dan UMK	Analisis data yang digunakan dengan metode data panel yaitu penggabungan antara <i>cross sectional</i> , dan <i>time series</i>	Berdasarkan hasil uji-t secara parsial menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan dan UMK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

2.2.1 Penelitian yang Dilakukan oleh Ilham Kristanto (2011) dalam skripsi yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi UMK di Kabupaten Jember. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbentuk dalam runtun waktu (*time series*). Data yang digunakan meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat inflasi dari tahun 1990-2011 di Jember, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disnakertrans). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah minimum. Namun jika secara parsial, variabel yang berpengaruh secara signifikan, dan positif hanya variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penetapan nilai upah minimum.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan PDRB sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah penelitian Ilham Kristanto menggunakan KHL, dan inflasi sebagai variabel independen. Sementara penelitian ini menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan PDRB. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian, dan analisis data yang digunakan. Penelitian Ilham Kristanto menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.

2.2.2 Penelitian yang Dilakukan oleh Rini Sulistiawati (2012) dalam jurnal dengan judul “Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Analisis data yang digunakan dengan metode data panel yaitu penggabungan antara *cross sectional*, dan *time series*. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat terhadap upah minimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap kenaikan upah minimum.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan TPAK sebagai variabel independen. Persamaan lainnya yaitu menggunakan analisis data menggunakan data panel. Perbedaannya adalah penelitian Rini Sulistiawati menggunakan data data tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian, cakupan penelitian yang dilakukan Rini Sulistiawati adalah kawasan semua Propinsi di Indonesia, sedangkan cakupan dalam penelitian ini menggunakan lingkup di Pulau Jawa.

2.2.3 Penelitian yang Dilakukan oleh Izatun Purnami (2015) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Tingkat Pendidikan Dan UMK tahun 2010-2013. Analisis data yang digunakan adalah metode data panel. Hasil penelitian menunjukkan hasil uji-t secara parsial menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan dan UMK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi data panel sebagai metode. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan tenaga kerja sebagai variabel dependen. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian Izatun Purnami berada di Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian ini menggunakan cakupan semua Propinsi di Pulau Jawa.

2.3 Kerangka Berpikir

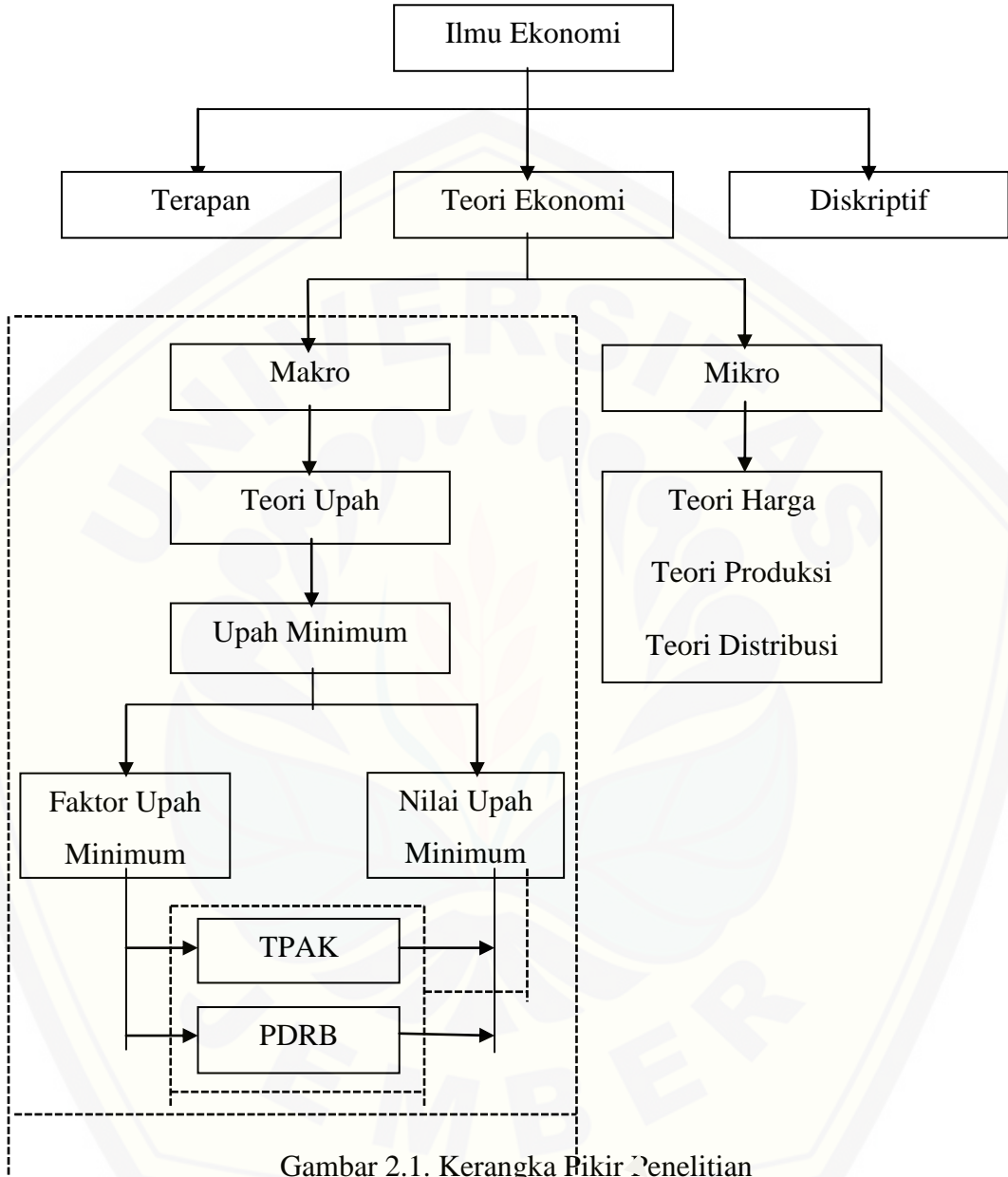
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diketahui bahwa nilai UMP di Pulau Jawa masih di bawah nilai rata-rata upah minimum nasional. Penentu kebijakan upah minimum adalah Pemerintah Daerah Propinsi dengan menerima usulan dari Dewan Pengupahan yang bersifat independen yang terdiri dari tripartite yaitu pakar praktisi, wakil serikat buruh, dan Wakil APINDO. Dalam penentuan kebijakan ini, ada beberapa komponen yang dipertimbangkan diantaranya TPAK dan laju PDRB.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan). Untuk

mengetahui banyaknya angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, maka dipakai suatu ukuran yang dinamakan TPAK. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. TPAK dihitung berdasarkan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada periode tertentu. TPAK akan mempengaruhi nilai upah minimum karena jika tingkat penawaran tenaga kerja tinggi, maka nilai upah akan cenderung menurun.

PDRB merupakan faktor yang mempengaruhi UMP. PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu di wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tetapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dari output PDRB, maka upah minimum akan meningkat.

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan maka dapat digambarkan bagan paradigma dalam penelitian ini:



Keterangan :

----- : hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara simultan

—————> : hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada landasan teori, penelitian sebelumnya, dan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : TPAK berpengaruh negatif terhadap upah minimum Propinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016

H2 : PDRB berpengaruh positif terhadap upah minimum Propinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dilihat dari pendekatan analisisnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Azwar (2001) mengungkapkan bahwa penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik. Jenis penelitian menggunakan penelitian *explanatory* (penjelasan) yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variable-variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam metode penelitian *explanatory* ini menjelaskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti (Nasir, 1998).

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pulau Jawa menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber seperti jurnal, studi pustaka, data dari BPS, dan dinas-dinas terkait lainnya

Waktu penelitian dimulai pada tahun 2010 hingga 2016 di Pulau Jawa. Alasan tersebut diambil karena upah minimum provinsi di Pulau Jawa terendah di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan menganalisis TPAK dan PDRB terhadap UMP di Pulau Jawa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada baik data internal maupun eksternal organisasi dan data dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen atau publikasi informasi.

Tabel 3.1. Sumber Data Penelitian

No	Variabel	Sumber Data
1	Upah Minimum Provinsi (UMP)	Survei Upah Buruh oleh BPS tahun 2010-2016
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Survei Angkatan Kerja Nasional oleh BPS tahun 2010-2016
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Survei Khusus Pendapatan Regional oleh BPS tahun 2010-2016

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis *cross section* dan *time series* dengan metode analisis regresi linier berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *E-views 9*.

3.4.1. Analisis Regresi Data Panel

Model penelitian tentang analisis tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB terhadap upah minimum menggunakan data panel yang ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$L_n UMP_{it} = \beta_0 + \beta_1 TPAK_{it} + L_n \beta_2 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana :

L_n : Logaritma natural

UMP : Upah minimum propinsi (Rupiah)

β_0 : Konstanta

β_1, β_2 : koefisien regresi

TPAK : TPAK (Persen)

PDRB : PDRB (Rupiah)

i : *cross section* (Provinsi)

t : *time series*

ε : *error term*

Dalam regresi data panel terdapat empat model yang dapat digunakan. Model tersebut antara lain: model *OLS pooled*, *model fixed effects least square dummy variabel (LSDV)*, *model fixed effects within-group* dan *model random effect* (Gujarati, 2013: 241). Pemilihan model yang akan dipakai, diseleksi dengan uji spesifikasi model. Terdapat dua uji spesifikasi yaitu efek tetap (*fixed effects*) atau efek random (*random effect*).

3.3.2 Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan metode regresi data panel ini dilakukan dengan bantuan Program *Eviews 9*. Metode ini digunakan untuk menentukan metode/pendekatan yang baik dalam mengestimasi regresi data panel terdapat beberapa prosedur yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow adalah pengujian yang digunakan untuk memilih metode yang sesuai antara *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect Model* (Yamin, 2011:201). Pengujian ini mengikuti distribusi F- statistik. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_0 : *Pooled Least Square* (PLS)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka ditolak, sehingga model menggunakan *fixed effect*.

2. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Menurut Damodar N. Gujarati (2013: 252) Uji Hausman dilakukan untuk menentukan metode yang paling baik antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka sebaiknya model menggunakan *fixed effect*.

3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Menurut Damodar N. Gujarati (2013: 253) *Lagrange Multiplier* (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* (REM) atau *Pooled Least Square* (PLS) metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Uji signifikansi *Random Effect Model* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan (BP). Metode Breusch Pagan untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya *random effect* σ_U^2 yaitu adalah sama dengan nol. Dengan hipotesis nol tersebut, BP menggunakan sebuah distribusi chi-kuadrat dengan 1 df karena hipotesis yang diuji tunggal yaitu $\sigma_U^2 = 0$. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : *Pooled Least Square* (PLS)

H_a : *Random Effect Model*(REM)

Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai statistik chi-square maka H_0 ditolak, yang artinya metode estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect*.

A. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program *Eviews 9*. Agar tercapai suatu estimasi, koefisien regresi diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*Ordinal Least Square Estimator*) yang merupakan estimasi linier tak bias BLUE (*Best Linier Unbiased Estimators*). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji ekonometrika yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (Yamin, 2011:115). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika koefisien korelasi memiliki nilai kurang dari 0,8 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2013).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Yamin, 2011:93). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *White*. Jika nilai probabilitas χ^2 hitung $>$ nilai probabilitas kritis α (0,05) maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian menggunakan uji Glejser. Glejser (Ansofino et al, 2016) mengatakan bahwa varian, variabel gangguan nilainya tergantung dari variable independen yang ada dalam model. Maka, Glejser menyarankan untuk melakukan regresi fungsi-fungsi residual. Dengan cara :

- a. Lakukan regresi tahap model dengan metode OLS, kemudian dapatkan residualnya.
 - b. Dapatkan nilai absolut residualnya
 - c. Lakukan regresi nilai absolut residual dengan variable independennya (X)
 - d. Jika nilai statistic $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak mengandung masalah heterokedastisitas, demikian sebaliknya.
3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada pada periode t-1 (Yamin, 2011:73).

Tabel 3.2. Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi Positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_l < d < d_u$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-d_u < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-d_u < d < 4d_l$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$d_u < d < 4-d_u$

Sumber : Damodar Gujarati, *Basic Econometrics*

Pengujian autokolerasi dilakukan dengan uji Durbin Watson dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung (d) dengan nilai Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l).

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Yamin, 2011:46). Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Pengambilan keputusan dengan Jargue-Bera test atau J-B test yaitu apabila nilai probability $> 5\%$, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

B. Uji Statistik

Uji statistik dilakukan dengan bantuan Program *Eviews 9*. Uji statistik ini digunakan untuk mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji secara serentak (uji-F), uji parsial (uji-t) dan koefisien determinasi berganda (R^2).

1. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model yang diasumsi layak atau tidak. Layak di sini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ariefianto, 2012:22). Apabila nilai probabilitas F hitung \leq tingkat signifikansi 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak.

2. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa model uji-t ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Jika probabilitas t hitung $\leq \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak
- 2) Jika probabilitas t hitung $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima, (Ariefianto, 2012:20).
- 3) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi atau sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diukur dengan nilai Adjusted R-Squared atau R^2 . Nilai R^2 selalu terletak antara 0 sampai dengan 1 (Ariefianto, 2012:25). Nilai R^2 digunakan untuk menunjukkan besarnya regresi yang mampu menjelaskan variabel terikat.

3. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan penjelasan terperinci mengenai hasil data yang telah didapatkan. Interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati karena kualitas analisis sangat tergantung pada kualitas interpretasi yang dibuat peneliti terhadap data. Interpretasi memiliki dua aspek yaitu:

- 1) Untuk keseimbangan penelitian yaitu hasil penelitian dapat dihubungkan dengan penemuan atau penelitian lainnya
- 2) Untuk membuat atau menjelaskan suatu konsep

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011:38). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

1. Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Propinsi adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur. Penelitian ini menggunakan UMP tahun 2010-2016.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.

3. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada periode tertentu (Mankiw, 2013:6).

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa Tahun 2010-2016. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan diterima.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa Tahun 2010-2016. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa TPAK berpengaruh positif dan signifikan diterima.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan tentang upah minimum yang dapat diterima oleh pengusaha maupun buruh, sehingga tercipta hubungan yang baik antara buruh dan pengusaha, dalam rangka mewujudkan adanya perjanjian bersama yang setara dan seimbang.
2. Adanya peningkatan penawaran tenaga kerja akan menurunkan tingkat upah, sehingga perlu digalakkan program kewirausahaan untuk mengurangi jumlah penawaran tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2010-2016a. *Upah Minimum Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2010-2016b. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2010-2016c. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2010. *Luas Wilayah*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2011-2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2012-2016. *Kondisi Perekonomian*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bersales, Lisa Grace. 2014. Determinant of Regional Minimum Wage in the Philippines. *Statistics Journal: Philippines*. School of Statistics, University of the Philippines Diliman.
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fisher, Richard Startz. 2004. *Makroekonomi, Edisi Bahasa Indonesia*. Terjemahan Yusuf dan Roy Indra Mirazudin. PT. Media Global Edukasi: Jakarta.
- Gujarati, Damodar N, Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilham Kistanto. 2011. Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember. *Skripsi: Jember*. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Iqbal Hasan. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Izatun Purnami. 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. *Skripsi: Jakarta*. Fakultas Ekonomi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Mankiw, Gregory, Euston Quah, Peter Wilson. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.

Meachern, William. 2001. *Ekonomi Mikro*. Jakarta : Salemba Empat.

Moch. Doddy Ariefianto. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.

Rini Sulistiawati. 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia. *Skripsi*: Pontianak. Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sadono Sukirno. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sadono Sukirno. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sofyan Yamin, Lien A. Rachmach, Heri Kurniawan. 2010. *Regresi dan Korelasi Aplikasi dengan Software SPSS, EVIEWS, MINITAB, dan STATGRAPHICS*. Jakarta: Salemba Empat.

Sofyan Yamin, Lien, A Rachmach, Heri Kurniawan. 2011. *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UU No. 14 Tahun 1969 Pokok Ketenagakerjaan

UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 Tentang Ketenagakerjaan

LAMPIRAN

Lampiran A. Data Penelitian

Tahun	Provinsi	UMP	TPAK (%)	PDRB
2010	DKI Jakarta	1.118.009	67.83	1.075.183.48
	Jawa Barat	671.500	62.38	906.685.76
	Jawa Tengah	660.000	70.60	623.224.62
	Yogyakarta	745.694	69.76	64.678.97
	Jawa Timur	630.000	69.08	990.648.84
	Banten	955.300	65.34	271.465.28
2011	DKI Jakarta	1.290.000	69.30	1.147.558.23
	Jawa Barat	732.000	61.34	965.622.06
	Jawa Tengah	675.000	70.15	656.268.13
	Yogyakarta	808.000	70.15	68.049.87
	Jawa Timur	705.000	68.06	1.054.401.77
	Banten	1.000.000	65.61	290.545.84
2012	DKI Jakarta	1.529.150	71.47	1.222.527.92
	Jawa Barat	780.000	63.64	1.028.409.74
	Jawa Tengah	765.000	71.26	691.343.12
	Yogyakarta	892.660	71.37	71.702.45
	Jawa Timur	745.000	69.60	1.124.464.64
	Banten	1.042.000	65.17	310.385.59
2013	DKI Jakarta	2.200.000	67.79	1.296.694.57
	Jawa Barat	850.000	62.82	1.093.543.55
	Jawa Tengah	830.000	70.43	726.655.12
	Yogyakarta	947.114	69.29	75.627.45
	Jawa Timur	866.250	69.78	1.192.789.80
	Banten	1.170.000	63.55	331.099.11
2014	DKI Jakarta	2.441.000	66.61	1.373.389.13
	Jawa Barat	1.000.000	62.77	1.149.216.06
	Jawa Tengah	910.000	69.68	764.959.15
	Yogyakarta	988.500	71.05	79.536.08
	Jawa Timur	1.000.000	68.12	1.262.684.50
	Banten	1.325.000	63.84	349.351.23
2015	DKI Jakarta	2.700.000	66.39	1.454.345.82
	Jawa Barat	1.000.000	60.34	1.207.083.41
	Jawa Tengah	910.000	67.86	806.775.36
	Yogyakarta	988.500	68.38	83.474.44
	Jawa Timur	1.000.000	67.84	1.331.394.99
	Banten	1.600.000	62.24	368.216.55
2016	DKI Jakarta	3.100.000	66.91	1.539.376.65
	Jawa Barat	2.250.000	60.65	1.275.546.48
	Jawa Tengah	1.265.000	67.15	849.383.56
	Yogyakarta	1.235.700	71.96	87.687.93
	Jawa Timur	1.283.000	66.14	1.405.236.11
	Banten	1.784.000	63.66	387.595.37

Lampiran B. Hasil Uji Analisi Deskriptif

Date: 05/02/18
 Time: 21:07
 Sample: 2010 2016

	LOGUMP	TPAK	LOGPDRB
Mean	13.88851	67.08000	13.23009
Median	13.80973	67.83500	13.68491
Maximum	14.94691	71.96000	14.24689
Minimum	13.35348	60.34000	11.07719
Std. Dev.	0.400851	3.288804	1.024507
Skewness	1.027193	-0.450001	-1.089786
Kurtosis	3.349958	2.069326	2.778125
Jarque-Bera	7.600206	2.933280	8.399582
Probability	0.022368	0.230699	0.014999
Sum	583.3176	2817.360	555.6637
Sum Sq. Dev.	6.587947	443.4654	43.03422
Observations	42	42	42

Lampiran C. Hasil Uji Pooled Least Square/Common Effect Model

Dependent Variable: LOGUMP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/02/18 Time: 20:53
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.37632	1.778242	8.084564	0.0000
TPAK	-0.021008	0.019732	-1.064659	0.2936
LOGPDRB	0.069644	0.063342	1.099492	0.2783
R-squared	0.080869	Mean dependent var		13.88851
Adjusted R-squared	0.033734	S.D. dependent var		0.400851
S.E. of regression	0.394032	Akaike info criterion		1.043980
Sum squared resid	6.055188	Schwarz criterion		1.168099
Log likelihood	-18.92358	Hannan-Quinn criter.		1.089475
F-statistic	1.715686	Durbin-Watson stat		0.244195
Prob(F-statistic)	0.193135			

Lampiran D. Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOGUMP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/02/18 Time: 20:53
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.87159	3.559486	-3.335199	0.0021
TPAK	-0.020187	0.018073	-1.116982	0.2718
LOGPDRB	2.049438	0.208049	9.850729	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.916535	Mean dependent var	13.88851
Adjusted R-squared	0.899351	S.D. dependent var	0.400851
S.E. of regression	0.127171	Akaike info criterion	-1.116927
Sum squared resid	0.549863	Schwarz criterion	-0.785942
Log likelihood	31.45546	Hannan-Quinn criter.	-0.995608
F-statistic	53.33664	Durbin-Watson stat	1.591591
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran E. Hasil Uji Random Effect Model

Dependent Variable: LOGUMP
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/02/18 Time: 20:54
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 42
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.731874	2.394946	3.228412	0.0025
TPAK	-0.067556	0.016097	-4.196851	0.0002
LOGPDRB	0.807879	0.130545	6.188519	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.394891	0.9060
Idiosyncratic random		0.127171	0.0940

Weighted Statistics			
R-squared	0.486465	Mean dependent var	1.678124
Adjusted R-squared	0.460130	S.D. dependent var	0.276257
S.E. of regression	0.202982	Sum squared resid	1.606865
F-statistic	18.47210	Durbin-Watson stat	0.925231
Prob(F-statistic)	0.000002		

Unweighted Statistics			
R-squared	-4.082514	Mean dependent var	13.88851
Sum squared resid	33.48333	Durbin-Watson stat	0.044402

Lampiran F. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	68.082810	(5,34)	0.0000
Cross-section Chi-square	100.758073	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOGUMP

Method: Panel Least Squares

Date: 05/02/18 Time: 20:54

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.37632	1.778242	8.084564	0.0000
TPAK	-0.021008	0.019732	-1.064659	0.2936
LOGPDRB	0.069644	0.063342	1.099492	0.2783
R-squared	0.080869	Mean dependent var		13.88851
Adjusted R-squared	0.033734	S.D. dependent var		0.400851
S.E. of regression	0.394032	Akaike info criterion		1.043980
Sum squared resid	6.055188	Schwarz criterion		1.168099
Log likelihood	-18.92358	Hannan-Quinn criter.		1.089475
F-statistic	1.715686	Durbin-Watson stat		0.244195
Prob(F-statistic)	0.193135			

Lampiran G. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	62.358249	2	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TPAK	-0.020187	-0.067556	0.000068	0.0000
LOGPDRB	2.049438	0.807879	0.026243	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOGUMP

Method: Panel Least Squares

Date: 05/02/18 Time: 20:55

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.87159	3.559486	-3.335199	0.0021
TPAK	-0.020187	0.018073	-1.116982	0.2718
LOGPDRB	2.049438	0.208049	9.850729	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.916535	Mean dependent var	13.88851
Adjusted R-squared	0.899351	S.D. dependent var	0.400851
S.E. of regression	0.127171	Akaike info criterion	-1.116927
Sum squared resid	0.549863	Schwarz criterion	-0.785942
Log likelihood	31.45546	Hannan-Quinn criter.	-0.995608
F-statistic	53.33664	Durbin-Watson stat	1.591591
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran H. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 05/02/18 Time: 21:05

Sample: 2010 2016

Total panel observations: 42

Probability in ()

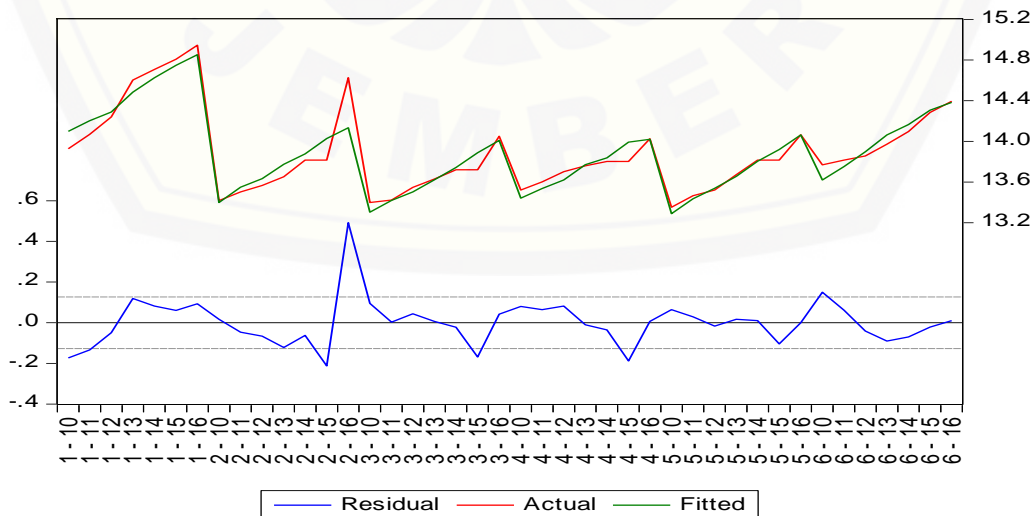
Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	30.99934 (0.0000)	5.651139 (0.0174)	36.65048 (0.0000)
Honda	5.567705 (0.0000)	2.377212 (0.0087)	5.617905 (0.0000)
King-Wu	5.567705 (0.0000)	2.377212 (0.0087)	5.714739 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	36.65048 (0.0000)

Lampiran I. Hasil Uji Multikolinieritas

	TPAK	LOGPDRB
TPAK	1.000000	-0.317449
LOGPDRB	-0.317449	1.000000

Lampiran J. Hasil Uji Heteroskedastisitas

J.1 Grafiik Uji Heteroskedastisitas



J.2 Hasil Uji Glejser

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/04/18 Time: 21:03
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 42
 White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.923485	6.205622	0.793391	0.4331
TPAK	0.004206	0.027444	0.153244	0.8791
LOGPDRB	-0.339804	0.367224	-0.925329	0.3613

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

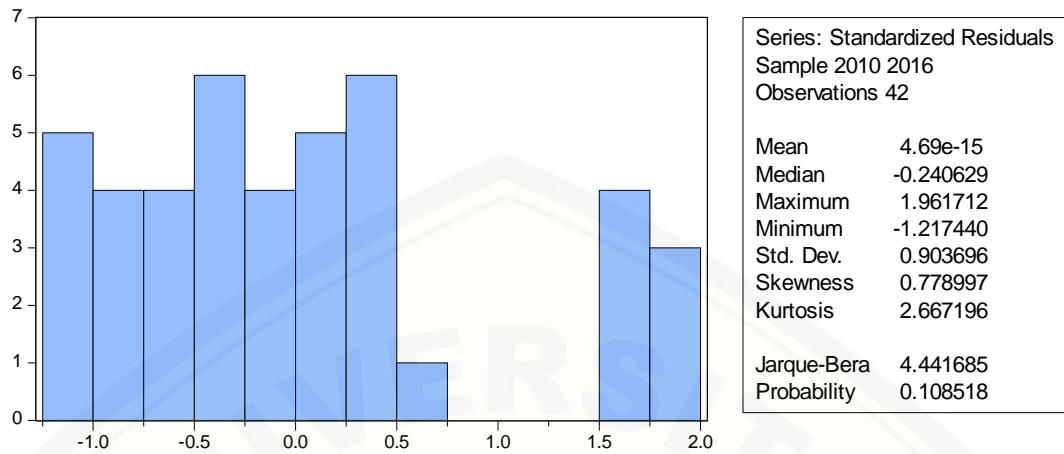
R-squared	0.929026	Mean dependent var	0.709967
Adjusted R-squared	0.914413	S.D. dependent var	0.548014
S.E. of regression	0.160322	Akaike info criterion	-0.653616
Sum squared resid	0.873912	Schwarz criterion	-0.322631
Log likelihood	21.72593	Hannan-Quinn criter.	-0.532297
F-statistic	63.57816	Durbin-Watson stat	1.652377
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran K. Hasil Uji Autokorelasi

K.1 Durbin-Waston

R-squared	0.916535	Mean dependent var	13.88851
Adjusted R-squared	0.899351	S.D. dependent var	0.400851
S.E. of regression	0.127171	Akaike info criterion	-1.116927
Sum squared resid	0.549863	Schwarz criterion	-0.785942
Log likelihood	31.45546	Hannan-Quinn criter.	-0.995608
F-statistic	53.33664	Durbin-Watson stat	1.591591
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran L. Hasil Uji Normalitas



Lampiran M. Data Upah Minimum Provinsi BPS Tahun 1997-2016

Provinsi	Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah)																			
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ACEH	128000	147000	171000	265000	300000	330000	425000	550000	620000	820000	850000	1000000	1200000	1300000	1350000	1400000	1550000	1750000	1900000	2118500
SUMATERA UTARA	151000	174000	210000	254000	340500	464000	505000	537000	600000	737794	761000	822205	905000	965000	1035500	1200000	1375000	1505850	1625000	1811875
SUMATERA BARAT	119000	137000	160000	200000	250000	385000	435000	480000	540000	650000	725000	800000	880000	940000	1055000	1150000	1350000	1490000	1615000	1800725
RIAU	151500	174000	218000	250700	329000	394000	437500	476900	551500	637000	710000	800000	901600	1016000	1120000	1238000	1400000	1700000	1878000	2095000
JAMBI	119500	137500	150000	173000	245000	304000	390000	425000	485000	563000	658000	724000	800000	900000	1028000	1142500	1300000	1502300	1710000	1906650
SUMATERA SELATAN	127500	146500	170000	190000	255000	331500	403500	460000	503700	604000	662000	743000	824730	927825	1048440	1195220	1630000	1825000	1974346	2206000
BENGKULU	127500	146500	150000	173000	240000	295000	330000	363000	430000	516000	644838	690000	735000	780000	815000	930000	1200000	1350000	1500000	1605000
LAMPUNG	126000	145000	160000	192000	240000	310000	350000	377500	405000	505000	555000	617000	691000	767500	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000
KEP. BANGKA BELITUNG	-	146500	170000	190000	255000	345000	379500	447900	560000	640000	720000	813000	850000	910000	1024000	1110000	1265000	1640000	2100000	2341500
KEP. RIAU	235000	174000	218000	300000	421500	-	-	-	557000	760000	805000	833000	892000	925000	975000	1015000	1365087	1665000	1954000	2178710
DKI JAKARTA	172500	198500	231000	286000	426300	591300	631600	671600	711843	819100	900560	972604	1069865	1118009	1290000	1529150	2200000	2441000	2700000	3100000
JAWA BARAT	172500	176800	208800	230000	245000	280800	320000	366500	408260	447654	516840	568193	628191	671500	732000	780000	850000	1000000	1000000	2250000
JAWA TENGAH	113000	130000	153000	185000	245000	314500	340400	365000	390000	450000	500000	547000	575000	660000	675000	765000	830000	910000	910000	-
DI YOGYAKARTA	106500	122500	130000	194500	237500	321800	360000	365000	400000	460000	500000	586000	700000	745694	808000	892660	947114	988500	988500	-
JAWA TIMUR	132500	143000	170500	214500	220000	245000	274000	310000	340000	390000	448500	500000	570000	630000	705000	745000	866250	1000000	1000000	-
BANTEN	-	176800	208800	230000	245000	360000	475000	515000	585000	661613	746500	837000	917500	955300	1000000	1042000	1170000	1325000	1600000	1784000
BALI	141500	162500	187000	214000	309800	341000	410000	425000	447500	510000	622000	682650	760000	829316	890000	967500	1181000	1542600	1621172	1807600
NUSA TENGGARA	108000	124000	145000	180000	240000	320000	375000	412500	475000	550000	645000	730000	832500	890775	950000	1000000	1100000	1210000	1330000	1482950

Lampiran N. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja BPS Tahun 2010-2011

Provinsi	2010									
	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)				Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja / AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK		
Aceh	1.776.254	162.265	1.938.519	91,63	359.804	561.707	208.620	1.130.131	3.068.650	63,17
Sumatera Utara	6.125.571	491.806	6.617.377	92,57	897.902	1.538.639	466.356	2.902.897	9.520.274	69,51
Sumatera Barat	2.041.454	152.586	2.194.040	93,05	348.344	567.559	196.321	1.112.224	3.306.264	66,36
Riau	2.170.247	207.247	2.377.494	91,28	407.119	816.449	133.779	1.357.347	3.734.841	63,66
Jambi	1.462.405	83.278	1.545.683	94,61	212.777	484.057	107.225	804.059	2.349.742	65,78
Sumatera Selatan	3.421.193	243.851	3.665.044	93,35	476.681	884.515	192.360	1.553.556	5.218.600	70,23
Bengkulu	815.741	39.285	855.026	95,41	114.993	172.004	47.832	334.829	1.189.855	71,86
Lampung	3.737.078	220.619	3.957.697	94,43	445.291	1.185.170	236.212	1.866.673	5.824.370	67,95
Bangka-Belitung	585.136	34.927	620.063	94,37	66.591	205.323	40.084	311.998	932.061	66,53
Kepulauan Riau	769.486	57.049	826.535	93,10	88.321	258.519	27.027	373.867	1.200.402	68,85
DKI Jakarta	4.689.761	582.843	5.272.604	88,95	744.607	1.409.455	346.146	2.500.208	7.772.812	67,83
Jawa Barat	16.942.444	1.951.391	18.893.835	89,67	2.521.083	7.189.255	1.683.836	11.394.174	30.288.009	62,38
Jawa Tengah	15.809.447	1.046.883	16.856.330	93,79	1.669.676	3.985.150	1.363.429	7.018.255	23.874.585	70,60
D I Y	1.775.148	107.148	1.882.296	94,31	279.420	437.630	98.788	815.838	2.698.134	69,76
Jawa Timur	18.698.108	828.943	19.527.051	95,75	1.885.898	5.437.150	1.418.726	8.741.774	28.268.825	69,08
Banten	4.583.085	726.377	5.309.462	86,32	746.693	1.699.073	371.182	2.816.948	8.126.410	65,34
Bali	2.177.358	68.791	2.246.149	96,94	199.093	353.215	104.116	656.424	2.902.573	77,38
Nusa Tenggara Barat	2.132.933	119.143	2.252.076	94,71	244.475	660.069	223.509	1.128.053	3.380.129	66,63
Nusa Tenggara Timur	2.061.229	71.152	2.132.381	96,66	261.945	399.695	136.385	798.025	2.930.406	72,77
Kalimantan Barat	2.095.705	101.620	2.197.325	95,38	221.764	475.303	108.561	805.628	3.002.953	73,17

Kalimantan Tengah	1.022.580	44.153	1.066.733	95,86	135.340	271.830	53.041	460.211	1.526.944	69,86
Kalimantan Selatan	1.743.622	96.674	1.840.296	94,75	157.762	456.230	128.399	742.391	2.582.687	71,26
Kalimantan Timur	1.481.898	166.557	1.648.455	89,90	227.131	511.431	95.302	833.864	2.482.319	66,41
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	936.939	99.635	1.036.574	90,39	138.793	368.047	93.952	600.792	1.637.366	63,31
Sulawesi Tengah	1.164.226	56.228	1.220.454	95,39	121.836	356.322	64.616	542.774	1.763.228	69,22
Sulawesi Selatan	3.272.365	298.952	3.571.317	91,63	414.063	1.210.068	372.153	1.996.284	5.567.601	64,14
Sulawesi Tenggara	997.678	48.221	1.045.899	95,39	110.464	255.779	43.230	409.473	1.455.372	71,86
Gorontalo	432.926	23.573	456.499	94,84	57.980	159.541	34.661	252.182	708.681	64,42
Sulawesi Barat	514.867	17.304	532.171	96,75	56.763	119.812	35.975	212.550	744.721	71,46
Maluku	586.430	64.909	651.339	90,03	126.383	160.722	41.270	328.375	979.714	66,48
Maluku Utara	411.361	26.397	437.758	93,97	74.547	133.346	26.709	234.602	672.360	65,11
Papua Barat	316.547	26.341	342.888	92,32	58.833	76.603	16.538	151.974	494.862	69,29
Papua	1.456.545	53.631	1.510.176	96,45	139.406	171.788	43.219	354.413	1.864.589	80,99
Total	108.207.767	8.319.779	116.527.546	92,86	14.011.778	32.971.456	8.559.559	55.542.793	172.070.339	67,72

Provinsi	2011									
	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)				Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja / AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK		
Aceh	1.790.369	177.043	1.967.412	91,00	393.614	601.993	183.528	1.179.135	3.146.547	62,53
Sumatera Utara	5.532.968	493.052	6.026.020	91,82	834.445	1.608.347	442.297	2.885.089	8.911.109	67,62
Sumatera Barat	2.051.696	178.926	2.230.622	91,98	352.996	617.828	213.086	1.183.910	3.414.532	65,33
Riau	2.311.171	149.941	2.461.112	93,91	440.163	871.506	120.573	1.432.242	3.893.354	63,21
Jambi	1.393.554	67.659	1.461.213	95,37	215.193	474.454	80.613	770.260	2.231.473	65,48
Sumatera Selatan	3.417.374	241.577	3.658.951	93,40	441.738	1.029.469	227.166	1.698.373	5.357.324	68,30
Bengkulu	837.674	30.025	867.699	96,54	119.123	200.947	47.945	368.015	1.235.714	70,22
Lampung	3.368.486	229.604	3.598.090	93,62	420.557	1.227.494	266.121	1.914.172	5.512.262	65,27
Bangka-Belitung	555.258	22.281	577.539	96,14	67.161	223.310	31.709	322.180	899.719	64,19
Kepulauan Riau	763.349	43.362	806.711	94,62	98.162	291.296	31.448	420.906	1.227.617	65,71
DKI Jakarta	4.528.589	599.515	5.128.104	88,31	665.555	1.341.602	264.937	2.272.094	7.400.198	69,30
Jawa Barat	17.407.516	1.926.537	19.334.053	90,04	2.488.156	7.950.859	1.747.021	12.186.036	31.520.089	61,34
Jawa Tengah	15.822.765	1.203.342	17.026.107	92,93	1.697.753	4.275.920	1.270.934	7.244.607	24.270.714	70,15
D I Y	1.839.824	84.494	1.924.318	95,61	276.682	431.619	110.518	818.819	2.743.137	70,15
Jawa Timur	18.463.606	1.050.333	19.513.939	94,62	2.026.109	5.652.083	1.478.739	9.156.931	28.670.870	68,06
Banten	4.376.110	696.811	5.072.921	86,26	593.947	1.680.725	384.436	2.659.108	7.732.029	65,61
Bali	2.159.158	65.716	2.224.874	97,05	236.675	382.254	115.389	734.318	2.959.192	75,19
Nusa Tenggara Barat	1.974.093	109.352	2.083.445	94,75	291.401	614.431	181.433	1.087.265	3.170.710	65,71
Nusa Tenggara Timur	2.032.237	65.308	2.097.545	96,89	330.771	487.881	142.398	961.050	3.058.595	68,58
Kalimantan Barat	2.158.251	104.088	2.262.339	95,40	259.931	496.047	105.868	861.846	3.124.185	72,41
Kalimantan Tengah	1.079.036	39.608	1.118.644	96,46	133.671	297.243	45.281	476.195	1.594.839	70,14
Kalimantan Selatan		119.189							2.634.662	71,94

	1.776.088		1.895.277	93,71	112.829	488.652	137.904	739.385		
Kalimantan Timur	1.521.316	196.387	1.717.703	88,57	209.994	581.150	71.643	862.787	2.580.490	66,56
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	953.546	107.184	1.060.730	89,90	153.745	385.546	92.864	632.155	1.692.885	62,66
Sulawesi Tengah	1.211.745	88.089	1.299.834	93,22	68.072	407.668	117.742	593.482	1.893.316	68,65
Sulawesi Selatan	3.326.880	294.537	3.621.417	91,87	421.623	1.298.786	367.697	2.088.106	5.709.523	63,43
Sulawesi Tenggara	954.981	47.002	1.001.983	95,31	88.529	331.412	79.635	499.576	1.501.559	66,73
Gorontalo	445.242	32.178	477.420	93,26	39.219	170.790	57.832	267.841	745.261	64,06
Sulawesi Barat	537.148	18.627	555.775	96,65	20.580	166.071	53.070	239.721	795.496	69,87
Maluku	618.899	75.033	693.932	89,19	123.914	174.643	39.927	338.484	1.032.416	67,21
Maluku Utara	426.466	24.073	450.539	94,66	55.785	160.183	31.287	247.255	697.794	64,57
Papua Barat	331.124	23.887	355.011	93,27	70.494	90.018	15.399	175.911	530.922	66,87
Papua	1.449.790	76.632	1.526.422	94,98	161.220	231.562	43.980	436.762	1.963.184	77,75
Total	107.416.309	8.681.392	116.097.701	92,52	13.909.807	35.243.789	8.600.420	57.754.016	173.851.717	66,78

Provinsi	2012									
	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)				Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja / AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK		
Aceh	1.808.357	180.126	1.988.483	90,94	367.574	652.214	213.386	1.233.174	3.221.657	61,72
Sumatera Utara	5.880.885	393.989	6.274.874	93,72	821.396	1.623.974	338.109	2.783.479	9.058.353	69,27
Sumatera Barat	2.085.483	148.524	2.234.007	93,35	387.878	630.832	215.327	1.234.037	3.468.044	64,42
Riau	2.399.851	109.650	2.509.501	95,63	457.110	920.278	127.085	1.504.473	4.013.974	62,52
Jambi	1.436.527	47.506	1.484.033	96,80	224.540	483.381	94.026	801.947	2.285.980	64,92
Sumatera Selatan	3.582.099	214.730	3.796.829	94,34	494.729	970.212	193.002	1.657.943	5.454.772	69,61
Bengkulu	853.784	32.031	885.815	96,38	132.140	198.614	46.350	377.104	1.262.919	70,14
Lampung	3.516.856	192.743	3.709.599	94,80	476.943	1.186.621	222.292	1.885.856	5.595.455	66,30
Bangka-Belitung	585.493	20.805	606.298	96,57	65.087	219.300	33.763	318.150	924.448	65,58
Kepulauan Riau	801.510	42.899	844.409	94,92	86.020	286.794	44.547	417.361	1.261.770	66,92
DKI Jakarta	4.823.858	516.136	5.339.994	90,33	681.185	1.178.893	271.824	2.131.902	7.471.896	71,47
Jawa Barat	18.615.753	1.859.141	20.474.894	90,92	2.645.128	7.468.994	1.585.032	11.699.154	32.174.048	63,64
Jawa Tengah	16.531.395	982.093	17.513.488	94,39	1.735.985	4.167.367	1.158.791	7.062.143	24.575.631	71,26
D I Y	1.906.145	77.397	1.983.542	96,10	284.950	403.947	106.634	795.531	2.779.073	71,37
Jawa Timur	19.338.902	828.615	20.167.517	95,89	2.151.823	5.227.317	1.430.526	8.809.666	28.977.183	69,60
Banten	4.662.368	514.783	5.177.151	90,06	699.959	1.731.817	334.969	2.766.745	7.943.896	65,17
Bali	2.252.475	48.230	2.300.705	97,90	249.410	340.660	113.363	703.433	3.004.138	76,58
Nusa Tenggara Barat	2.015.699	111.150	2.126.849	94,77	281.906	619.762	197.413	1.099.081	3.225.930	65,93
Nusa Tenggara Timur	2.120.249	66.464	2.186.713	96,96	344.004	443.903	150.281	938.188	3.124.901	69,98
Kalimantan Barat	2.196.455	80.520	2.276.975	96,46	273.824	512.579	125.754	912.157	3.189.132	71,40
Kalimantan Tengah	1.112.252	36.023	1.148.275	96,86	133.560	310.827	50.558	494.945	1.643.220	69,88

Kalimantan Selatan	1.833.892	100.418	1.934.310	94,81	96.888	476.605	180.527	754.020	2.688.330	71,95
Kalimantan Timur	1.607.526	159.374	1.766.900	90,98	251.975	574.036	69.294	895.305	2.662.205	66,37
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	973.035	84.381	1.057.416	92,02	172.054	380.986	107.731	660.771	1.718.187	61,54
Sulawesi Tengah	1.224.095	50.365	1.274.460	96,05	56.900	460.435	141.635	658.970	1.933.430	65,92
Sulawesi Selatan	3.421.101	218.720	3.639.821	93,99	405.327	1.311.597	447.426	2.164.350	5.804.171	62,71
Sulawesi Tenggara	994.521	42.958	1.037.479	95,86	101.946	328.658	73.394	503.998	1.541.477	67,30
Gorontalo	455.322	21.312	476.634	95,53	27.088	192.088	65.917	285.093	761.727	62,57
Sulawesi Barat	572.081	12.613	584.694	97,84	14.755	176.110	39.788	230.653	815.347	71,71
Maluku	613.357	51.250	664.607	92,29	139.038	193.685	58.687	391.410	1.056.017	62,94
Maluku Utara	450.184	22.814	472.998	95,18	48.033	156.237	38.889	243.159	716.157	66,05
Papua Barat	347.559	19.934	367.493	94,58	73.853	84.004	21.517	179.374	546.867	67,20
Papua	1.485.799	57.172	1.542.971	96,29	166.651	214.821	49.054	430.526	1.973.497	78,18
Total	112.504.868	7.344.866	119.849.734	93,87	14.549.659	34.127.548	8.346.891	57.024.098	176.873.832	67,76

Provinsi	2013									
	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)				Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja / AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK		
Aceh	1.842.671	207.405	2.050.076	89,88	436.385	635.607	171.849	1.243.841	3.293.917	62,24
Sumatera Utara	6.081.301	419.449	6.500.750	93,55	832.745	1.492.467	379.248	2.704.460	9.205.210	70,62
Sumatera Barat	2.061.109	155.578	2.216.687	92,98	364.766	675.720	265.994	1.306.480	3.523.167	62,92
Riau	2.479.493	143.817	2.623.310	94,52	463.652	913.528	134.696	1.511.876	4.135.186	63,44
Jambi	1.397.247	69.760	1.467.007	95,24	187.217	544.683	141.576	873.476	2.340.483	62,68
Sumatera Selatan	3.524.883	179.249	3.704.132	95,16	423.604	1.072.123	349.182	1.844.909	5.549.041	66,75
Bengkulu	832.048	40.185	872.233	95,39	106.412	237.247	74.538	418.197	1.290.430	67,59
Lampung	3.471.602	209.482	3.681.084	94,31	429.266	1.256.822	310.340	1.996.428	5.677.512	64,84
Bangka-Belitung	597.613	22.657	620.270	96,35	58.101	225.269	45.043	328.413	948.683	65,38
Kepulauan Riau	806.073	48.077	854.150	94,37	86.990	306.323	48.227	441.540	1.295.690	65,92
DKI Jakarta	4.668.239	440.704	5.108.943	91,37	634.740	1.454.990	337.875	2.427.605	7.536.548	67,79
Jawa Barat	18.731.943	1.888.667	20.620.610	90,84	2.690.091	7.895.573	1.618.763	12.204.427	32.825.037	62,82
Jawa Tengah	16.469.960	1.054.062	17.524.022	93,99	1.526.977	4.436.765	1.394.044	7.357.786	24.881.808	70,43
D I Y	1.886.071	63.172	1.949.243	96,76	201.760	479.109	182.976	863.845	2.813.088	69,29
Jawa Timur	19.553.910	878.543	20.432.453	95,70	2.071.265	5.343.825	1.435.386	8.850.476	29.282.929	69,78
Banten	4.687.626	494.170	5.181.796	90,46	723.729	1.870.672	377.249	2.971.650	8.153.446	63,55
Bali	2.242.076	41.820	2.283.896	98,17	242.274	396.392	125.359	764.025	3.047.921	74,93
Nusa Tenggara Barat	2.032.282	113.720	2.146.002	94,70	252.508	658.731	223.076	1.134.315	3.280.317	65,42
Nusa Tenggara Timur	2.104.507	70.664	2.175.171	96,75	384.388	481.202	150.987	1.016.577	3.191.748	68,15
Kalimantan Barat	2.172.337	90.395	2.262.732	96,01	289.645	538.033	163.769	991.447	3.254.179	69,53
Kalimantan Tengah	1.124.017	34.817	1.158.834	97,00	148.943	328.599	55.295	532.837	1.691.671	68,50

Kalimantan Selatan	1.830.813	69.537	1.900.350	96,34	175.122	509.909	156.274	841.305	2.741.655	69,31
Kalimantan Timur	1.603.915	138.465	1.742.380	92,05	307.039	610.016	84.590	1.001.645	2.744.025	63,50
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	965.457	70.315	1.035.772	93,21	164.963	428.991	113.793	707.747	1.743.519	59,41
Sulawesi Tengah	1.239.122	54.210	1.293.332	95,81	128.075	447.599	103.704	679.378	1.972.710	65,56
Sulawesi Selatan	3.376.549	181.634	3.558.183	94,90	533.452	1.423.883	383.135	2.340.470	5.898.653	60,32
Sulawesi Tenggara	997.231	45.716	1.042.947	95,62	143.018	333.973	62.463	539.454	1.582.401	65,91
Gorontalo	458.930	19.883	478.813	95,85	76.509	182.719	41.038	300.266	779.079	61,46
Sulawesi Barat	545.438	13.136	558.574	97,65	54.772	183.149	39.302	277.223	835.797	66,83
Maluku	602.429	66.292	668.721	90,09	152.692	203.981	54.455	411.128	1.079.849	61,93
Maluku Utara	454.978	17.987	472.965	96,20	77.206	151.227	33.599	262.032	734.997	64,35
Papua Barat	359.527	16.554	376.081	95,60	76.535	96.249	15.094	187.878	563.959	66,69
Papua	1.559.675	50.809	1.610.484	96,85	186.011	221.403	54.808	462.222	2.072.706	77,70
Total	112.761.072	7.410.931	120.172.003	93,83	14.630.852	36.036.779	9.127.727	59.795.358	179.967.361	66,77

Provinsi	2014									
	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)				Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja / AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK		
Aceh	1.931.823	191.489	2.123.312	90,98	460.830	632.852	150.013	1.243.695	3.367.007	63,06
Sumatera Utara	5.881.371	390.712	6.272.083	93,77	979.572	1.704.945	394.441	3.078.958	9.351.041	67,07
Sumatera Barat	2.180.336	151.657	2.331.993	93,50	443.014	618.426	183.786	1.245.226	3.577.219	65,19
Riau	2.518.485	176.762	2.695.247	93,44	466.710	952.619	142.544	1.561.873	4.257.120	63,31
Jambi	1.491.038	79.784	1.570.822	94,92	226.424	499.067	98.770	824.261	2.395.083	65,59
Sumatera Selatan	3.692.806	192.868	3.885.674	95,04	500.785	1.030.505	226.672	1.757.962	5.643.636	68,85
Bengkulu	868.794	31.260	900.054	96,53	147.706	219.231	51.012	417.949	1.318.003	68,29
Lampung	3.673.158	184.778	3.857.936	95,21	495.812	1.187.250	218.173	1.901.235	5.759.171	66,99
Bangka-Belitung	604.223	32.736	636.959	94,86	81.426	225.100	29.707	336.233	973.192	65,45
Kepulauan Riau	819.656	58.759	878.415	93,31	95.419	318.597	39.601	453.617	1.332.032	65,95
DKI Jakarta	4.634.369	429.110	5.063.479	91,53	729.908	1.514.046	294.041	2.537.995	7.601.474	66,61
Jawa Barat	19.230.943	1.775.196	21.006.139	91,55	2.953.139	7.828.307	1.677.761	12.459.207	33.465.346	62,77
Jawa Tengah	16.550.682	996.344	17.547.026	94,32	1.949.253	4.361.129	1.324.559	7.634.941	25.181.967	69,68
D I Y	1.956.043	67.418	2.023.461	96,67	270.545	439.522	114.226	824.293	2.847.754	71,05
Jawa Timur	19.306.508	843.490	20.149.998	95,81	2.318.138	5.725.112	1.385.434	9.428.684	29.578.682	68,12
Banten	4.853.992	484.053	5.338.045	90,93	730.458	1.894.230	398.872	3.023.560	8.361.605	63,84
Bali	2.272.632	44.126	2.316.758	98,10	260.078	401.400	114.644	776.122	3.092.880	74,91
Nusa Tenggara Barat	2.094.100	127.710	2.221.810	94,25	321.386	632.573	158.882	1.112.841	3.334.651	66,63
Nusa Tenggara Timur	2.174.228	73.210	2.247.438	96,74	412.767	467.847	133.287	1.013.901	3.261.339	68,91
Kalimantan Barat	2.226.510	93.719	2.320.229	95,96	337.474	520.227	140.132	997.833	3.318.062	69,93
Kalimantan Tengah	1.154.489	38.682	1.193.171	96,76	174.713	316.908	55.589	547.210	1.740.381	68,56

Kalimantan Selatan	1.867.462	73.767	1.941.229	96,20	234.849	506.344	112.186	853.379	2.794.608	69,46
Kalimantan Timur	1.677.466	133.663	1.811.129	92,62	315.144	592.884	106.307	1.014.335	2.825.464	64,10
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	980.756	79.996	1.060.752	92,46	173.111	420.168	114.131	707.410	1.768.162	59,99
Sulawesi Tengah	1.293.226	49.389	1.342.615	96,32	171.035	414.728	82.676	668.439	2.011.054	66,76
Sulawesi Selatan	3.527.036	188.765	3.715.801	94,92	664.641	1.301.848	307.459	2.273.948	5.989.749	62,04
Sulawesi Tenggara	1.037.419	48.090	1.085.509	95,57	172.669	314.325	50.761	537.755	1.623.264	66,87
Gorontalo	479.137	20.919	500.056	95,82	84.448	174.438	36.875	295.761	795.817	62,84
Sulawesi Barat	595.797	12.649	608.446	97,92	82.847	137.243	27.719	247.809	856.255	71,06
Maluku	601.651	70.653	672.304	89,49	157.684	221.479	52.176	431.339	1.103.643	60,92
Maluku Utara	456.017	25.487	481.504	94,71	88.536	149.866	33.859	272.261	753.765	63,88
Papua Barat	378.436	19.988	398.424	94,98	76.625	91.374	16.951	184.950	583.374	68,30
Papua	1.617.437	57.676	1.675.113	96,56	192.348	204.659	57.284	454.291	2.129.404	78,67
Total	114.628.026	7.244.905	121.872.931	94,06	16.769.494	36.019.249	8.330.530	61.119.273	182.992.204	66,60

Provinsi	2015									
	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)				Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja / AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK		
Aceh	1.966.018	216.806	2.182.824	90,07	420.955	658.268	178.587	1.257.810	3.440.634	63,44
Sumatera Utara	5.962.304	428.794	6.391.098	93,29	980.664	1.661.466	465.746	3.107.876	9.498.974	67,28
Sumatera Barat	2.184.599	161.564	2.346.163	93,11	414.955	672.483	200.635	1.288.073	3.634.236	64,56
Riau	2.554.296	217.053	2.771.349	92,17	449.952	1.000.793	161.456	1.612.201	4.383.550	63,22
Jambi	1.550.403	70.349	1.620.752	95,66	223.169	497.410	109.133	829.712	2.450.464	66,14
Sumatera Selatan	3.695.866	238.921	3.934.787	93,93	500.481	1.057.043	248.997	1.806.521	5.741.308	68,53
Bengkulu	904.317	46.690	951.007	95,09	144.917	209.219	40.611	394.747	1.345.754	70,67
Lampung	3.635.258	196.850	3.832.108	94,86	469.345	1.318.560	221.952	2.009.857	5.841.965	65,60
Bangka-Belitung	623.949	41.893	665.842	93,71	75.602	220.803	35.873	332.278	998.120	66,71
Kepulauan Riau	836.670	55.318	891.988	93,80	127.128	315.775	35.998	478.901	1.370.889	65,07
DKI Jakarta	4.724.029	368.190	5.092.219	92,77	686.419	1.554.836	337.113	2.578.368	7.670.587	66,39
Jawa Barat	18.791.482	1.794.874	20.586.356	91,28	3.090.504	8.555.422	1.885.201	13.531.127	34.117.483	60,34
Jawa Tengah	16.435.142	863.783	17.298.925	95,01	1.976.376	4.896.482	1.320.680	8.193.538	25.492.463	67,86
D I Y	1.891.218	80.245	1.971.463	95,93	297.972	475.397	138.148	911.517	2.882.980	68,38
Jawa Timur	19.367.777	906.904	20.274.681	95,53	2.302.395	5.924.108	1.383.661	9.610.164	29.884.845	67,84
Banten	4.825.460	509.383	5.334.843	90,45	796.515	2.022.225	418.007	3.236.747	8.571.590	62,24
Bali	2.324.805	47.210	2.372.015	98,01	243.189	427.238	98.843	769.270	3.141.285	75,51
Nusa Tenggara Barat	2.127.503	128.376	2.255.879	94,31	330.094	650.588	153.523	1.134.205	3.390.084	66,54
Nusa Tenggara Timur	2.219.291	88.446	2.307.737	96,17	406.687	479.617	138.359	1.024.663	3.332.400	69,25
Kalimantan Barat	2.235.887	121.337	2.357.224	94,85	318.090	565.881	141.971	1.025.942	3.383.166	69,68
Kalimantan Tengah	1.214.681	57.780	1.272.461	95,46	154.969	314.349	47.738	517.056	1.789.517	71,11

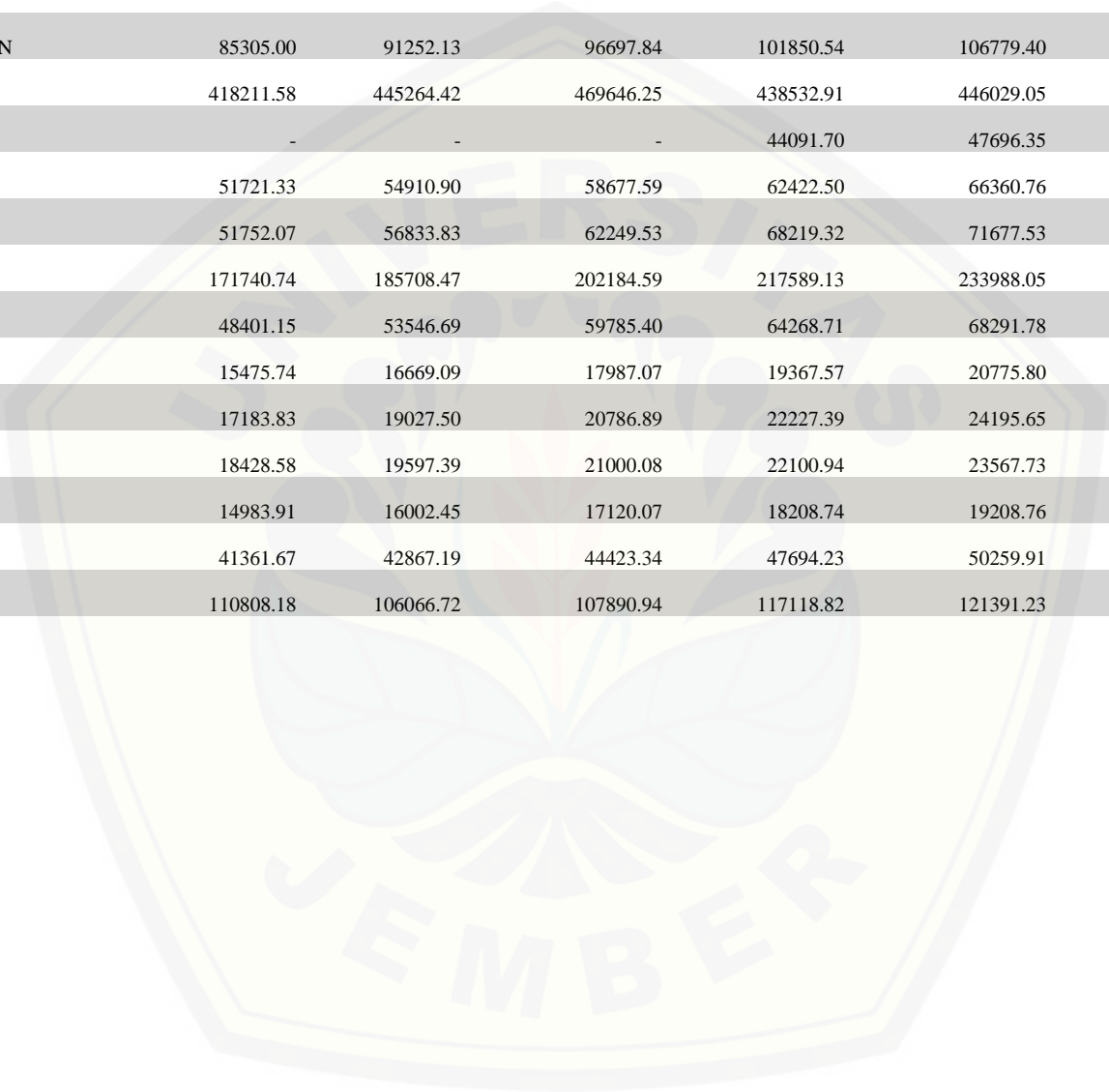
Kalimantan Selatan	1.889.502	97.748	1.987.250	95,08	218.371	532.584	111.824	862.779	2.850.029	69,73
Kalimantan Timur	1.423.957	115.534	1.539.491	92,50	272.331	560.800	94.889	928.020	2.467.511	62,39
Kalimantan Utara	267.023	16.079	283.102	94,32	51.145	93.017	18.906	163.068	446.170	63,45
Sulawesi Utara	1.000.032	99.240	1.099.272	90,97	168.465	427.374	98.594	694.433	1.793.705	61,28
Sulawesi Tengah	1.327.418	56.817	1.384.235	95,90	165.217	419.334	81.706	666.257	2.050.492	67,51
Sulawesi Selatan	3.485.492	220.636	3.706.128	94,05	640.269	1.380.100	355.378	2.375.747	6.081.875	60,94
Sulawesi Tenggara	1.074.916	63.129	1.138.045	94,45	172.953	295.681	58.416	527.050	1.665.095	68,35
Gorontalo	493.687	24.101	517.788	95,35	78.825	185.526	31.367	295.718	813.506	63,65
Sulawesi Barat	595.905	20.644	616.549	96,65	78.687	153.303	28.905	260.895	877.444	70,27
Maluku	655.063	72.196	727.259	90,07	146.021	203.186	51.671	400.878	1.128.137	64,47
Maluku Utara	482.543	31.058	513.601	93,95	84.274	149.468	25.838	259.580	773.181	66,43
Papua Barat	380.226	33.409	413.635	91,92	73.078	95.075	20.460	188.613	602.248	68,68
Papua	1.672.480	69.465	1.741.945	96,01	174.949	230.290	42.046	447.285	2.189.230	79,57
Total	114.819.199	7.560.822	122.380.021	93,82	16.734.963	38.203.701	8.782.232	63.720.896	186.100.917	65,76

Provinsi	2016									
	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)				Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja / AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK		
Aceh	2.087.045	170.898	2.257.943	92,43	366.892	715.618	173.512	1.256.022	3.513.965	64,26
Sumatera Utara	5.991.229	371.680	6.362.909	94,16	853.283	1.824.049	601.651	3.278.983	9.641.892	65,99
Sumatera Barat	2.347.911	125.903	2.473.814	94,91	360.250	690.680	163.382	1.214.312	3.688.126	67,08
Riau	2.765.946	222.006	2.987.952	92,57	409.972	990.002	121.982	1.521.956	4.509.908	66,25
Jambi	1.624.522	67.671	1.692.193	96,00	213.062	497.819	102.476	813.357	2.505.550	67,54
Sumatera Selatan	3.998.637	180.157	4.178.794	95,69	460.828	963.990	233.839	1.658.657	5.837.451	71,59
Bengkulu	964.971	32.942	997.913	96,70	122.114	210.081	42.669	374.864	1.372.777	72,69
Lampung	3.931.321	190.347	4.121.668	95,38	437.611	1.194.514	167.389	1.799.514	5.921.182	69,61
Bangka-Belitung	686.830	18.343	705.173	97,40	66.849	216.542	34.391	317.782	1.022.955	68,93
Kepulauan Riau	859.813	71.622	931.435	92,31	123.308	331.681	26.348	481.337	1.412.772	65,93
DKI Jakarta	4.861.832	317.007	5.178.839	93,88	650.644	1.604.980	305.422	2.561.046	7.739.885	66,91
Jawa Barat	19.202.038	1.873.861	21.075.899	91,11	3.136.149	8.725.263	1.810.007	13.671.419	34.747.318	60,65
Jawa Tengah	16.511.136	801.330	17.312.466	95,37	1.866.447	5.240.132	1.363.854	8.470.433	25.782.899	67,15
D I Y	2.042.400	57.036	2.099.436	97,28	273.286	430.895	114.035	818.216	2.917.652	71,96
Jawa Timur	19.114.563	839.283	19.953.846	95,79	2.318.810	6.591.198	1.304.768	10.214.776	30.168.622	66,14
Banten	5.088.497	498.596	5.587.093	91,08	722.542	2.066.866	399.483	3.188.891	8.775.984	63,66
Bali	2.416.555	46.484	2.463.039	98,11	220.448	415.510	90.021	725.979	3.189.018	77,24
Nusa Tenggara Barat	2.367.310	97.021	2.464.331	96,06	306.812	546.728	125.577	979.117	3.443.448	71,57
Nusa Tenggara Timur	2.277.068	76.580	2.353.648	96,75	427.049	504.889	116.489	1.048.427	3.402.075	69,18
Kalimantan Barat	2.287.823	100.935	2.388.758	95,77	295.662	637.486	124.251	1.057.399	3.446.157	69,32

Kalimantan Tengah	1.248.189	63.238	1.311.427	95,18	157.465	334.825	35.494	527.784	1.839.211	71,30
Kalimantan Selatan	1.965.088	113.296	2.078.384	94,55	224.464	504.888	96.110	825.462	2.903.846	71,57
Kalimantan Timur	1.581.239	136.653	1.717.892	92,05	203.316	535.158	77.747	816.221	2.534.113	67,79
Kalimantan Utara	273.423	15.099	288.522	94,77	48.562	112.516	12.751	173.829	462.351	62,40
Sulawesi Utara	1.110.564	73.157	1.183.721	93,82	149.871	382.425	102.145	634.441	1.818.162	65,11
Sulawesi Tengah	1.459.803	49.702	1.509.505	96,71	158.482	349.082	71.244	578.808	2.088.313	72,28
Sulawesi Selatan	3.694.712	186.291	3.881.003	95,20	578.786	1.372.535	335.631	2.286.952	6.167.955	62,92
Sulawesi Tenggara	1.219.548	34.076	1.253.624	97,28	150.079	267.604	35.083	452.766	1.706.390	73,47
Gorontalo	546.668	15.528	562.196	97,24	75.928	168.119	21.888	265.935	828.131	67,89
Sulawesi Barat	624.182	21.489	645.671	96,67	62.178	165.200	24.915	252.293	897.964	71,90
Maluku	690.786	52.363	743.149	92,95	140.278	211.343	57.192	408.813	1.151.962	64,51
Maluku Utara	503.479	21.047	524.526	95,99	83.051	154.486	30.415	267.952	792.478	66,19
Papua Barat	402.360	32.457	434.817	92,54	61.916	109.514	14.501	185.931	620.748	70,05
Papua	1.664.485	57.677	1.722.162	96,65	195.635	268.585	59.080	523.300	2.245.462	76,70
Total	118.411.973	7.031.775	125.443.748	94,39	15.922.029	39.335.203	8.395.742	63.652.974	189.096.722	66,34

Lampiran O. Data PDRB Menurut Harga Konstan BPS Tahun 2010-2016

Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)						
	Harga Konstan 2010						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ACEH	101545.24	104874.21	108914.90	111755.83	113490.36	112661.04	116386.73
SUMATERA UTARA	331085.24	353147.59	375924.14	398727.14	419573.31	440955.85	463775.46
SUMATERA BARAT	105017.74	111679.49	118724.42	125940.63	133340.84	140704.88	148110.75
RIAU	388578.23	410215.84	425626.00	436187.51	447986.78	448991.96	458998.09
JAMBI	90618.41	97740.87	104615.08	111766.13	119991.44	125036.40	130499.63
SUMATERA SELATAN	194012.97	206360.70	220459.20	232175.05	243297.77	254044.88	266815.41
BENGKULU	28352.57	30295.05	32363.04	34326.37	36207.15	38066.01	40082.87
LAMPUNG	150560.84	160437.50	170769.21	180620.01	189797.49	199536.10	209807.19
KEP. BANGKA BELITUNG	35561.90	38013.99	40104.91	42190.86	44159.44	45961.46	47852.69
KEP. RIAU	111223.67	118961.42	128034.97	137263.85	146325.23	155112.88	162922.50
DKI JAKARTA	1075183.48	1147558.23	1222527.92	1296694.57	1373389.13	1454345.82	1539376.65
JAWA BARAT	906685.76	965622.06	1028409.74	1093543.55	1149216.06	1207083.41	1275546.48
JAWA TENGAH	623224.62	656268.13	691343.12	726655.12	764959.15	806775.36	849383.56
DI YOGYAKARTA	64678.97	68049.87	71702.45	75627.45	79536.08	83474.44	87687.93
JAWA TIMUR	990648.84	1054401.77	1124464.64	1192789.80	1262684.50	1331394.99	1405236.11
BANTEN	271465.28	290545.84	310385.59	331099.11	349351.23	368216.55	387595.37
BALI	93749.35	99991.63	106951.46	114103.58	121787.57	129130.59	137192.52
NUSA TENGGARA BARAT	70122.73	67379.14	66340.81	69766.71	73372.96	89344.58	94548.21
NUSA TENGGARA TIMUR	43846.61	46334.13	48863.19	51505.19	54107.97	56831.92	59775.70
KALIMANTAN BARAT	86065.85	90797.59	96161.93	101980.34	107114.96	112324.86	118184.63
KALIMANTAN TENGAH	56531.02	60492.93	64649.17	69410.99	73724.52	78890.97	83909.49



KALIMANTAN SELATAN	85305.00	91252.13	96697.84	101850.54	106779.40	110867.88	115727.55
KALIMANTAN TIMUR	418211.58	445264.42	469646.25	438532.91	446029.05	440647.70	438977.04
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	44091.70	47696.35	49316.00	51164.99
SULAWESI UTARA	51721.33	54910.90	58677.59	62422.50	66360.76	70425.14	74771.07
SULAWESI TENGAH	51752.07	56833.83	62249.53	68219.32	71677.53	82803.20	91070.55
SULAWESI SELATAN	171740.74	185708.47	202184.59	217589.13	233988.05	250758.28	269338.55
SULAWESI TENGGARA	48401.15	53546.69	59785.40	64268.71	68291.78	72991.33	77739.55
GORONTALO	15475.74	16669.09	17987.07	19367.57	20775.80	22068.59	23507.15
SULAWESI BARAT	17183.83	19027.50	20786.89	22227.39	24195.65	25983.65	27550.26
MALUKU	18428.58	19597.39	21000.08	22100.94	23567.73	24859.06	26291.19
MALUKU UTARA	14983.91	16002.45	17120.07	18208.74	19208.76	20381.03	21556.32
PAPUA BARAT	41361.67	42867.19	44423.34	47694.23	50259.91	52346.49	54711.28
PAPUA	110808.18	106066.72	107890.94	117118.82	121391.23	130459.91	142476.35

Lampiran P. Data PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Tahun 2011-2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.277,28	1.319,31	1.353,56	1.360,07	1.375,40
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	779,14	792,09	806,77	803,28	801,46
a. Tanaman Pangan	20,06	21,54	21,92	21,94	21,75
b. Tanaman Hortikultura Semusim	29,39	29,61	29,96	29,99	30,06
c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	649,06	662,87	674,60	670,07	668,19
e. Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Peternakan	71,01	68,37	70,43	71,30	71,35
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	9,62	9,70	9,86	9,98	10,12
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Perikanan	498,13	527,22	546,79	556,79	573,94
B. Pertambangan dan Penggalian	3.029,33	3.009,26	3.002,79	2.976,97	2.950,56
1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	2.543,57	2.509,99	2.485,65	2.453,83	2.423,87
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	485,76	499,27	517,14	523,14	526,69
C. Industri Pengolahan	156.240,35	160.011,70	168.558,61	177.829,01	186.803,04
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	49,91	51,81	53,84	53,91	54,07
2. Industri Makanan dan Minuman	9.211,55	9.988,15	10.610,53	11.257,71	12.694,30
3. Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	9.637,80	9.557,08	9.682,85	9.927,24	10.270,53
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	219,20	214,68	221,19	226,72	241,47
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	300,50	308,94	332,04	338,20	331,72
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4.929,35	5.106,63	5.229,43	5.345,35	5.738,41

8.Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	21.917,57	21.842,43	23.402,88	24.087,84	23.985,55
9.Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.657,20	3.573,33	3.621,38	3.526,35	3.424,80
10.Industri Barang Galian bukan Logam	1.633,44	1.647,53	1.673,96	1.721,10	1.594,40
11.Industri Logam Dasar	4.991,78	5.065,74	5.036,46	5.186,36	5.250,83
12.Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	10.754,76	11.167,93	12.058,38	13.031,90	13.837,48
13.Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	243,70	228,76	228,74	226,30	233,40
14.Industri Alat Angkutan	85.480,16	87.917,88	92.958,65	99.453,48	105.508,59
15.Industri Furnitur	1.556,49	1.607,50	1.651,36	1.579,00	1.594,70
16.Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1.656,95	1.733,32	1.796,93	1.867,55	2.042,78
D. Pengadaan Listrik, Gas	3.457,90	3.642,50	3.668,13	3.754,45	3.770,95
1.Ketenagalistrikan	1.250,07	1.352,23	1.392,06	1.444,11	1.483,63
2. Gas	2.207,83	2.290,27	2.276,07	2.310,35	2.287,32
E. Pengadaan Air	565,08	588,51	608,34	631,77	643,79
F. Konstruksi	160.265,13	168.958,21	179.383,48	188.294,71	195.742,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	193.770,46	206.961,97	217.980,31	228.775,73	234.872,71
1.Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	32.045,72	34.669,20	37.726,63	39.835,50	37.340,03
2.Perdagangan Besar dan Eceran	161.724,74	172.292,77	180.253,68	188.940,23	197.532,68
H. Transportasi dan Pergudangan	32.081,73	34.306,41	36.714,96	41.779,74	45.535,83
1.Angkutan Rel	449,45	450,31	460,24	473,23	467,93
2.Angkutan Darat	15.096,00	16.261,30	17.517,30	18.924,66	20.337,42
3.Angkutan Laut	4.472,27	4.701,46	4.653,61	4.649,68	4.747,73
4.Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	22,31	22,20	22,11	22,15	22,59
5.Angkutan Udara	178,56	176,82	172,52	2.497,20	3.448,48
6.Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	11.863,14	12.694,32	13.889,18	15.212,82	16.511,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57.627,41	61.258,50	65.235,43	68.850,22	72.582,23
1.Penyediaan Akomodasi	8.091,44	8.744,19	9.609,40	10.467,52	10.604,55
2.Penyediaan Makan Minum	49.535,97	52.514,31	55.626,03	58.382,70	61.977,68

J. Informasi dan Komunikasi	90.736,42	103.212,68	115.748,68	128.573,63	141.519,41
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	114.639,14	125.417,03	134.744,30	140.160,37	155.189,39
1.Jasa Perantara Keuangan	58.330,99	64.945,07	69.515,81	70.181,53	81.052,91
2.Asuransi dan Dana Pensiun	39.101,00	42.282,08	45.998,64	49.485,34	52.442,06
3.Jasa Keuangan Lainnya	12.001,96	12.528,54	13.081,16	13.907,02	14.726,78
4.Jasa Penunjang Keuangan	5.205,19	5.661,33	6.148,69	6.586,48	6.967,64
L. Real Estat	79.359,56	84.689,74	88.985,51	93.399,19	97.809,81
M, N. Jasa Perusahaan	78.460,80	83.916,95	90.835,65	98.965,44	106.646,60
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	61.800,27	62.651,01	60.859,27	61.594,05	62.319,34
P. Jasa Pendidikan	58.684,43	62.220,20	64.427,12	66.798,03	71.191,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.767,54	19.268,30	20.379,28	21.775,26	23.429,17
R. S. T. U. Jasa lainnya	37.795,38	41.095,64	44.209,16	47.870,89	51.720,45
PDRB	1.147.558,23	1.222.527,92	1.296.694,57	1.373.389,55	1.454.102,11

* Angka sementara

** Angka sangat sementara